

Syaeful Bakhri, S.E., M.Si.

# **MEMBANGUN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN IKM**

**(INDUSTRI  
KECIL DAN  
MENENGAH)**

**MEMBANGUN EKONOMI  
MASYARAKAT MELALUI  
PENGEMBANGAN IKM (INDUSTRI  
KECIL DAN MENENGAH)**

**Syaeful Bakhri, S.E, M.Si**



Penerbit K-Media  
Yogyakarta, 2020

---

**MEMBANGUN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI  
PENGEMBANGAN IKM (INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH)**

xiv + 214 hlm.; 15,5 x 23 cm

---

**ISBN: 978-xxx**

**Penulis** : Syaeful Bakhri  
**Editor** : Destry Angraeni  
**Tata Letak** : Nur Huda A.  
  
**Cetakan** : Agustus 2020

Copyright © 2020 by Penerbit K-Media  
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

---

**Isi di luar tanggung jawab percetakan**

---

Penerbit K-Media  
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.  
e-mail: kmedia.cv@gmail.com



## KATA SAMBUTAN

**Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, M.M**

Professor at Sharia Banking Department  
Faculty of Sharia and Islamic Economics  
IAIN Syekh Nurjati, Cirebon - Indonesia

*Bismillahirrahmanirrahim*

Teriring puji syukur kepada Allah SWT, saya merasa bahagia dan bersyukur karena “orang-orang muda” pemilik estafet di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini sudah mulai menghasilkan karya yang semoga bermanfaat bagi dunia akademik dengan terbitnya buku karya saudara Syaeful Bakhri ini yang mengangkat tema terkait pembangunan ekonomi masyarakat kecil dengan judul membangun ekonomi masyarakat melalui pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah).

Sepengetahuan saya buku ini sudah mulai disusun sejak lama, dimulai dari awal tahun 2019 hingga diperkaya hasil penelitian yang dilakukannya. Ada kelebihan buku ini karena didalamnya juga terangkum hasil penelitian yang dilakukan dalam memotret bagaimana kondisi dan perkembangan IKM yang ada di Kabupaten Cirebon. Terutama menyangkut kepemilikan sertifikat halal serta pengaruhnya terhadap pendapatan usaha pelaku IKM. Menurut hemat saya, IAIN syekh Nurjati sepatutnya hadir baik secara institusi ataupun pribadi pada perkembangan ekonomi Syariah baik di daerah bahkan kalau bisa ikut mewarnai di tingkat Pusat.



Buku ini mengangkat tema tentang IKM yang menurut saya masuk dalam rumpun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). IKM adalah entitas ekonomi yang sebenarnya “tahan banting” dalam segala kondisi ekonomi. Pelaku usaha IKM tidak terpengaruh krisis global, apalagi hanya naik turunnya permintaan karena inflasi. Krisis 1997-1998 yang banyak memporakporandakan ekonomi dunia termasuk Indonesia, mencetak sejarah sektor UMKM termasuk didalamnya IKM tetap tumbuh dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kenapa demikian? Jawaban secara sederhana; karena UMKM juga di dalamnya IKM beroperasi dan menjalankan usahanya dengan bahan baku lokal, alat yang di pakai juga komponen lokal yang masih mudah di akses dan tidak terdampak fluktuasi rupiah pada saat itu.

Walaupun harus diakui, masa pandemi ini membuat hampir semua elemen ekonomi menjadi terpuruk baik dari sektor formal sampai sektor informal, tidak terkecuali UMKM dan IKM merasakan dampak yang tidak ringan. Kenapa ini berbeda pada tahun 1997-1998. Tahun pandemi ini memaksa orang untuk “tetap” di rumah. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah juga banyak mengharuskan usaha untuk “libur” terlebih dahulu tanpa kebijakan yang jelas juga kapan harus berakhir. Kejadian ini membuat konsumsi masyarakat turun drastis, produksi tidak berjalan, pendapatan menurun dan dalam ekonomi itu menjadi salah satu parameter ketidakseimbangan ekonomi.

Memperhatikan gerak langkah pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak pernah kenal lelah, mandiri tanpa harus tergantung dengan bantuan permodalan perbankan, spirit usaha yang gigih, kreativitas yang terus berkembang selayaknya diberikan



apresiasi oleh pemerintah baik pusat dan daerah. Pelaku IKM harus terus di berikan *support* agar tetap tumbuh. Karena IKM sudah secara nyata berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di sektor riil.

Dalam membangun IKM yang mampu bersaing, ada beberapa modal yang harus disiapkan, baik disiapkan pelaku IKM itu sendiri ataupun pemerintah. Pertama, *Human Capital* (modal manusia) sering juga disebut dengan modal sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat penting dipersiapkan untuk membangun IKM yang dunia usaha yang sudah sangat kompetitif. Kedua, *Physical Capital*, adalah pentingnya modal fisik bagi keberlanjutan usaha IKM, meliputi ketersediaan infrastruktur dasar, seperti ketersediaan transportasi, air bersih, alat komunikasi serta peralatan produksi lainnya. Yang ketiga, *Social Capital* atau modal sosial yaitu bagaimana pelaku IKM juga dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan, melayani customer dengan baik dengan selalu meningkatkan mutu produksi dan pelayanan. Selanjutnya ada *Financial Capital*, bagaimana mengatur keuangan, menambah permodalan untuk perluasan usaha, akses ke perbankan termasuk penting untuk pengembangan IKM. Dan yang terakhir ada *Natural Capital*, bagaimana pelaku IKM mampu beradaptasi dengan lingkungan usaha dimana dia melakukan aktivitas usaha. Beberapa komponen diatas merupakan bagaimana faktor-faktor IKM tetap tumbuh dan berkembang.

Ungkapan bahagia ini juga menegaskan bahwa buku ini diharapkan menjadi bacaan yang menarik dan perlu menjadi bahan diskusi oleh pelaku IKM, Pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan IKM, perguruan tinggi, mahasiswa dan seluruh stakeholder yang memiliki kepedulian bagi pengembangan IKM di



Indonesia. Akhir kata, selamat dan terus berkarya, semoga buku ini memberikan manfaat bagi kita semua yang membacanya.

*Alhamdulillahirabbil 'alamin*

Cirebon, Agustus 2020

**Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, M.M**



## **KATA PENGANTAR**

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syekh Nurjati, Cirebon - Indonesia**

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. atas lindungan dan rahmat-Nya karena Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon kembali menambah koleksi produk pengetahuan dengan terbitnya buku *Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah)*. Hal ini diharapkan bisa memperkaya khazanah Keilmuan terutama dalam ekonomi berbasis masyarakat.

Kehadiran buku karya saudara Syaeful Bakhri ini juga merupakan perwujudan dari aktualisasi dosen dalam turut serta memperbincangkan dan memberikan solusi bagi persoalan ekonomi masyarakat. Buku ini secara teori dan praktis memperkuat dan memperkaya ragam pendekatan dalam pengembangan ekonomi masyarakat terutama pada pengembangan sektor Industri kecil dan menengah (IKM).

Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, saya mengajak semua civitas akademika untuk terus mengembangkan diri, baik secara kompetensi keilmuan, penelitian, penulisan naskah buku maupun pengabdian kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang sudah berkenan mengorbankan waktu, perhatian, dan sumber daya untuk kemajuan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Agustus 2020

**Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag**



## KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah) ini dapat diselesaikan.

Sejarah telah mencatat terjadinya krisis moneter tahun 1997-1998 yang berlanjut menjadi krisis ekonomi. Pada saat itu banyak perusahaan berskala besar yang tumbang karena tidak mampu lagi memproduksi. Penyebabnya adalah karena harga bahan baku terutama komponen impor mengalami kenaikan drastis. Selain itu, sektor perbankan mengalami permasalahan likuiditas, lembaga keuangan tidak mampu menjaga perannya sebagai pendukung sektor usaha dalam menjalankan operasionalnya.

Disisi lain, sejarah juga sudah mencatat bagaimana UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) termasuk didalamnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat tetap bertahan pada kondisi krisis ekonomi tersebut. Bagaimana UMKM cenderung bertahan dan beberapa IKM bahkan mengalami kemajuan di saat krisis, bahkan dianggap sebagai *backbone* yang menyelamatkan negara dari keterpurukan ekonomi yang semakin mendalam. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kebutuhan UMKM pada umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik terkait bahan baku, permodalan, peralatan dan sumber daya manusianya.

IKM memiliki peran yang tidak kecil bagi pertumbuhan ekonomi, Industri Kecil dan Menengah memegang peranan yang sangat penting dan strategis, sebagai salah satu pilar perekonomian di daerah. Inovasi dan kreativitas yang dijalankan IKM tidak pernah kehabisan ide untuk selalu melihat dan mengintip peluang dari setiap peristiwa. Tidak ada momen yang terlewat bagi IKM untuk membuat bahkan menciptakan relasi dengan pasar.



Momen hari besar keagamaan, hari peringatan kemerdekaan, sampai dengan momen-momen yang lebih spesifik seperti kegiatan wisuda, peringatan ulang tahun kota/Kabupaten menjadi target IKM untuk memasarkan produknya. Kenyataan tersebut membuat perekonomian tetap tumbuh dan menggeliat sepanjang tahun.

Pelaku IKM mengajarkan kepada kita untuk melihat kuadran penghasilan, pelaku IKM tidak pusing dengan status. Dengan melakukan kegiatan usaha, pelaku IKM sudah menempatkan dirinya dalam kuadran penghasilan berada pada level *business owner*, dalam kuadran tersebut posisi itu ada dilevel ke 2 dari atas setelah investor. Urutannya sebagai berikut; (1) Investor, (2) *Business Owner*, (3) *Self Employee* (4) *Employee*. Pelaku IKM bukan saja mengajarkan membuka lapangan pekerjaan tapi bagaimana usahanya mampu bermanfaat buat orang lain.

Merujuk pada kuadran penghasilan, pelaku IKM sangat yakin dan percaya diri dengan *passionnya*, bahwa untuk sejahtera dan maju tidak harus menjadi Pegawai. Bagi pelaku IKM hari-harinya adalah kreativitas, setiap hari selalu muncul ide-ide inovasi baik produk, marketing maupun membangun *networking*. IKM mengajarkan bagaimana memaksimalkan kekuatan dan peluang dengan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dengan membangun semangat optimisme pelaku IKM mencoba membangun relasi yang sangat baik dengan pelanggan.

Penulis sangat yakin IKM dan UMKM lainnya akan tetap tumbuh berkembang, dukungan itu juga datang dari Negara. Untuk mendorong pemasaran produk IKM, Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020 secara resmi telah meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Gerakan tersebut bila dilaksanakan dengan baik dan didukung oleh pemerintah daerah akan menjadi stimulan yang sangat luar biasa bagi pengembangan IKM, khususnya di pasar dan pemasaran yang selama ini memang sudah sangat pesat persaingannya bahkan dengan produk-produk impor.



Buku ini mengulas tentang konsep dan peranan IKM secara substansial, tentang peluang dan tantangan, sekaligus strategi pengembangan IKM. Mengulas kiat-kiat menuju industri hijau, serta terkait perkembangan IKM halal. Pembahasan ini penting karena dapat menjadi masukan untuk kebijakan pengembangan kinerja IKM dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, baik dalam skala lokal, regional maupun nasional bahkan global.

*Disruption* era, dimana persaingan menjadi tidak *head to head*, dimana kadang persaingan menjadi sangat jauh dari kata adil, saat semua bebas bersaing yang terbaik dalam menawarkan jasa, layanan, produk ke masyarakat. Penting pada era ini untuk selalu bersikap terbuka, bersikap kreatif dan selalu memunculkan inovasi agar tetap bisa bertahan dalam persaingan global. Teknologi Informasi mengubah banyak hal, marketing digital, pembayaran non tunai, pembelian online baik produk maupun jasa membuat layanan yang konvensional dan yang “biasa-biasa” saja akan kalah dalam bersaing. Semua IKM harus segera naik kelas, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi jika tidak mau tertinggal.

Saat ini jumlah IKM di Indonesia kian mengalami peningkatan di tengah kondisi perkembangan persaingan yang semakin pelik dan meluas. Perkembangan ini mendorong bagaimana tumbuh kembang IKM yang sudah dianggap sebagai faktor strategis terutama dalam mengembangkan ekonomi masyarakat dapat bertahan dan menopang daya saing ekonomi global. Apakah mungkin? Anda dapat menemukan jawaban dan pembahasannya dalam buku ini.

Akhir Kata, Penulis mengucapkan selamat membaca.

Assalamua’laikum, Wr. Wb.

Cirebon, Agustus 2020

**Syaeful Bakhri**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya buku ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua yang telah mendukung hingga penulisan buku ini dapat selesai dan sampai ke tangan pembaca.

Pertama, Kepada Rektor IAIN Syekh Nurjati yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan hasilnya kemudian dikembangkan menjadi sebuah buku.

Kedua, Kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan *support* sehingga penulisan buku ini dapat selesai.

Ketiga, Ketua LP2M IAIN Syekh Nurjati, Kapuslit Penelitian yang banyak memfasilitasi seputar penelitian baik internal maupun eksternal, Mas Ahmad Khoirudin (Heru) yang sudah banyak direpotkan membuat surat pengantar, surat tugas dan lainnya.

Keempat, Destry Angraeni selaku editor, Ibu Dr. Cucu Herawati, M.Kes yang sudah membantu analisis data pada penelitian IKM halal yang menjadi satu bab tersendiri di buku ini.

Kelima, Pak H. Deni Agustin, S.E., selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dan Bu Hj. Endang Sri Puji Astuti, M.Si., selaku Kepala Bidang Perindustrian yang banyak membantu dan memfasilitasi data IKM.

Tak lupa saya juga berterima kasih sekali kepada rekan-rekan dosen, Pak Layaman, Pak Afif Muamar, Pak Rana, Pak Shodiqin dan segenap civitas akademika di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Semoga buku ini bermanfaat.



***Kupersembahkan ;***  
Buat Istriku Haniah,  
Anakku Sulthan Aulia Syah dan Dinar Maula Zahra  
*Semoga tetap menjadi busur semangat dalam berkarya*

dan Buat Seluruh Pelaku IKM dimanapun Berada  
*Selalu semangat, Tetap kreatif dan inovatif*



## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, M.M .....	iii
KATA PENGANTAR DEKAN FSEI.....	viii
KATA PENGANTAR PENULIS.....	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

## BAB 1

<b>MENGENAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Industri Kecil dan Menengah .....	1
B. Jenis Usaha Industri Kecil dan Menengah .....	5
C. Perkembangan Industri Kecil dan Menengah di Indonesia .....	9
D. Perkembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon.....	15

## BAB 2

<b>PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH .....</b>	<b>23</b>
A. Regulasi dan Kebijakan Industri Kecil dan Menengah.....	24
B. Peran Pemerintah Pusat .....	33
C. Peran Pemerintah Daerah .....	40

## BAB 3

<b>INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT .....</b>	<b>46</b>
A. Peran IKM dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat .....	47
B. Peran IKM dalam Solusi Mengatasi Pengangguran.....	51
C. Peran IKM dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat .....	58



## **BAB 4**

### **PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI KECIL DAN**

#### **MENENGAH..... 64**

- A. Peluang dan Tantangan IKM di Indonesia Secara Umum ..... 64
- B. Peluang dan Tantangan IKM di Kabupaten Cirebon ..... 76

## **BAB 5**

### **INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN EKONOMI DIGITAL .. 85**

- A. Pentingnya Membangun Teknologi Informasi bagi IKM ..... 86
- B. Marketing Digital bagi IKM ..... 888
- C. Strategi Pengembangan IKM dalam Pasar Global ..... 96

## **BAB 6**

### **KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI KECIL DAN**

#### **MENENGAH..... 104**

- A. Kreativitas ..... 104
- B. Inovasi..... 108
- C. Model-model Pengembangan IKM ..... 118
- D. Pentingnya Inovasi dalam Pasar Global ..... 125

## **BAB 7**

### **MENUJU INDUSTRI HIJAU ..... 132**

- A. Industri Kecil Ramah Lingkungan ..... 10432
- B. Mengutamakan Bahan Ramah Lingkungan..... 10835
- C. Industri Berbasis 4R..... 11841



# **BAB 8**

## **PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**

<b>HALAL</b> .....	<b>147</b>
A. Sejarah Sertifikasi Halal .....	147
B. Produk Halal .....	153
C. Keuntungan Memiliki Sertifikat Halal .....	156
D. Definisi IKM Halal .....	159
E. Perkembangan IKM Halal .....	166
<b>REFERENSI</b> .....	<b>173</b>
<b>PROFIL PENULIS</b> .....	<b>181</b>





# BAB 1

## MENGENAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan sektor yang sangat berperan strategis dalam mendorong pergerakan ekonomi Nasional. Keberadaan IKM saat ini juga kian mengalami peningkatan, termasuk di beberapa kota dan Kabupaten di Indonesia. Dalam bab ini penulis akan mengungkap sejauh mana perkembangan IKM secara Nasional maupun Regional. Namun sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui pengertian IKM terlebih dahulu, agar dengannya kita lebih mudah memahami Industri Kecil dan Menengah secara mendalam.

### **A. Pengertian Industri Kecil dan Menengah**

Industri merupakan suatu usaha maupun kegiatan dalam pengelolaan bahan mentah ataupun barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan (Ellen, 2015). Hasil dari industri tersebut dapat berupa barang dan jasa. Barang di sini contohnya pada industri pakaian, industri makanan dan minuman serta industri furniture. Misalnya saja pada industri makanan dan minuman yang didapat dari pengolahan mangga, ikan pindang serta kacang kedelai. Dalam persaingan industri, menurut (Amirullah, 2015) para pelaku usaha



akan saling mempengaruhi satu di antara lainnya. Biasanya, industri-industri mencakup kekayaan bauran dari beberapa strategi yang digunakan pelaku industri untuk memperoleh daya saing strategi dan laba di atas rata-rata.

Pengertian Industri Kecil dan Menengah di Indonesia masih sangat beragam, namun dalam pengertiannya, menurut (Partomo & Soejoedono, 2002), sedikitnya selalu mencakup dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan yang ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap oleh suatu perusahaan. Seperti halnya pengertian Industri Kecil sendiri, yaitu:

1. Menurut Badan Pusat Statistik (2003), mendefinisikan industri kecil merupakan usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual. Dengan jumlah pekerja yang dikategorikan seperti berikut ini:
  - a. Perusahaan atau industri rumah tangga jika memperkerjakan kurang dari 3 orang.
  - b. Perusahaan atau industri pengolahan termasuk jasa industri pengolahan yang memperkerjakan 1 sampai 19 orang termasuk pengusaha, baik perusahaan atau usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak.
2. Menurut Deperindag (Departemen Perindustrian dan Perdagangan) tahun 1999, industri kecil adalah kegiatan usaha industri yang memiliki investasi mencapai Rp. 200.000.000,-



- (dua ratus juta rupiah) yang mana didalamnya tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.
3. Menurut Bank Indonesia, industri kecil yakni industri yang aset (tidak termasuk tanah dan bangunan), bernilai kurang dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
  4. Lain lagi Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008:
    - a. Pasal 1 ayat 2, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
    - b. Pasal 6: (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  5. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019, industri kecil adalah industri yang memperkerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang mana jumlah tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tanah dan bangunan yang dimaksud adalah tanah dan



bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Sementara Industri Menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), serta memiliki kekayaan bersih di atas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. Sementara itu (Permenperin, 2016) menambahkan bahwa dalam industri menengah, tenaga kerja yang diperkerjakan adalah paling sedikit 20 orang karyawan dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Berikut merupakan klasifikasi perusahaan Kecil dan Menengah di Indonesia secara umum, yaitu:

1. Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM.
2. Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.
3. Daerah operasi umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan.
4. Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana yang kecil.



## **B. Jenis Usaha Industri Kecil dan Menengah**

Adapun jenis usaha Industri Kecil yang dikategorikan menurut Departemen Perindustrian adalah :

### **1. Industri Kecil Modern**

Industri kecil modern meliputi industri kecil yang menggunakan teknologi proses madya (intermediate process technologies), mempunyai skala produksi yang terbatas, tergantung pada dukungan industri besar dan menengah dan dengan sistem pemasaran domestik dan ekspor, menggunakan mesin khusus dan alat-alat perlengkapan modal lainnya. Dengan kata lain, industri kecil yang modern telah mempunyai akses untuk menjangkau sistem pemasaran yang relatif telah berkembang baik di pasar domestik ataupun pasar ekspor.

### **2. Industri Kecil Tradisional**

Industri kecil tradisional pada umumnya mempunyai ciri-ciri antara lain, proses teknologi yang digunakan secara sederhana, mesin yang digunakan dan alat perlengkapan modal lainnya relatif sederhana, lokasi di daerah pedesaan, akses untuk menjangkau pasar yang berbeda di luar lingkungan yang berdekatan terbatas.

### **3. Industri Kerajinan Kecil.**

Industri kecil ini sangat beragam, mulai dari industri kecil yang menggunakan proses teknologi yang sederhana sampai industri kecil yang menggunakan teknologi proses madya atau malahan sudah menggunakan proses teknologi yang tinggi. Selain potensinya untuk menyediakan lapangan kerja dan kesempatan untuk memperoleh pendapatan bagi kelompok-kelompok yang berpendapatan rendah, terutama di pedesaan, industri kecil



juga didorong atas landasan budaya yakni mengingat peranan pentingnya dalam pelestarian warisan budaya Indonesia.

Indarti (2004: 22) menyebutkan industri kecil dan kerajinan rumah tangga di Indonesia memiliki eksistensi yang berbeda tergantung pada kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor tersebut yaitu:

1. Industri lokal merupakan jenis industri yang menggantungkan kelangsungan produknya ditangan sendiri, sedangkan pedagang dan perantara boleh dikatakan kurang menonjol. Hidupnya pada pasar setempat yang terbatas serta relatif tersebar dari segi lokasinya.
2. Industri sentra merupakan jenis industri yang dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil tetapi membentuk suatu pengelompokan atau kawasan produksi yang terdiri dari kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis.
3. Industri mandiri merupakan jenis industri yang masih mempunyai sifat-sifat industri kecil, namun telah berkemampuan mengadaptasi teknologi produksi yang cukup canggih.

Klasifikasi industri yang digunakan oleh BPS adalah berdasarkan kepada *International Standard Industrial Classification Of All Economics Activities* (ISIC) revisi yang ke 3, dimana ISIC ini telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kode baku lapangan usaha suatu perusahaan industri ditentukan berdasarkan produksi utamanya, yaitu jenis komoditi yang dihasilkan dengan nilai paling



besar. Sementara itu, menurut (Wijaya, 2018) macam-macam jenis usaha pada industri dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Industri kimia dasar, seperti industri semen, obat-obatan, kertas dan pupuk.
2. Industri mesin dan logam dasar, seperti industri pesawat terbang, tekstil serta kendaraan bermotor.
3. Industri kecil, seperti industri roti, makanan ringan, es dan minyak goreng curah.
4. Aneka Industri, seperti industri pakaian, makanan dan minuman.

Adapun sub-sektor industri menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia dalam (Dharmawati, 2017) adalah meliputi :

1. Periklanan, kegiatan kreatif pada jasa periklanan adalah komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya saja pamflet, brosur dan berbagai poster.
2. Arsitektur, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, dan konservasi bangunan.
3. Pasar barang seni, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, barang antik dan langka yang memiliki nilai estetika seni yang tinggi dan dipasarkan melalui proses lelang, galeri dan lainnya.
4. Produksi kerajinan, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pembuatan desain sampai dengan proses penyelesaian produknya untuk kemudian didistribusikan yang mana kegiatan ini biasanya hanya dilakukan pada jumlah yang relatif kecil,



seperti produksi olahan dari kayu, rotan, kaca, tanah liat dan logam.

5. Desain, yaitu kegiatan kreatif terkait desain interior, desain grafis dan desain industri.
6. Pakaian (fashion), kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi pakaian beserta aksesorinya seperti alas kaki sesuai dengan mode yang berlaku pada waktu tertentu.
7. Video, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi produksi dan distribusi video dan film.
8. Permainan interaktif, kegiatan kreatif yang terkait dengan pembuatan hasil kreasi, produksi dan distribusi permainan komputer melalui tampilan video yang bersifat ketangkasan, hiburan dan alat interaktif sebagai alat bantu pembelajaran maupun edukasi.
9. Musik, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan menghasilkan, menunjukkan dan mendistribusikan hasil rekaman suara.
10. Seni pertunjukan, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan konten, produksi pertunjukkan, desain dan pembuatan sarana prasarana pertunjukkan, tata kelola panggung dan pencahayaan pertunjukkan.
11. Penerbitan dan percetakan, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan jurnal, tabloid, koran dan majalah.
12. Layanan komputer dan Piranti lunak, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti pengolahan data, pengembangan database, desain prasarana peranti lunak dan peranti keras.



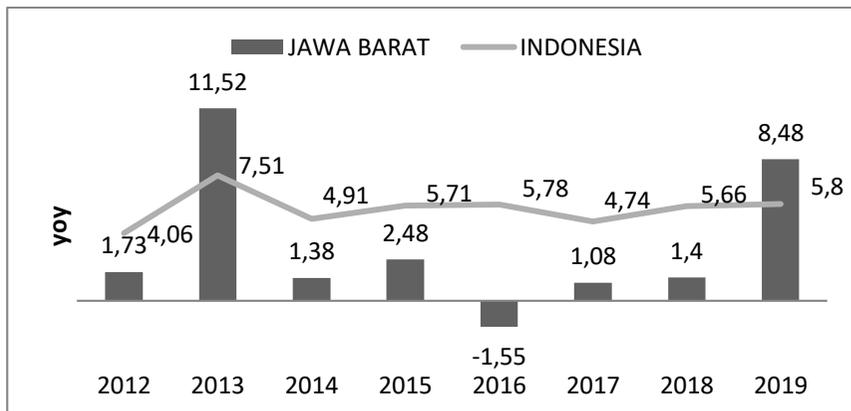
13. Televisi dan radio, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan industri kreasi produksi dan pengemasan acara televisi dan radio.
14. Riset dan pengembangan, kegiatan kreatif terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan untuk menghasilkan produk baru, alat baru dan metode baru untuk memenuhi kebutuhan pasar.
15. Kuliner, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan produksi, pengolahan dan distribusi yang menarik dengan tetap mempertimbangkan pola *cost* yang kecil namun memiliki pangsa pasar yang luas serta banyak diminati masyarakat.

### **C. Perkembangan Industri Kecil dan Menengah di Indonesia**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator krusial dalam hal keberhasilan pembangunan nasional. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di luar dari indikator lainnya. Dalam hal pertumbuhan ekonomi nasional, Industri Kecil dan Menengah yang juga merupakan bagian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap mampu berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi bahkan dianggap sebagai tulang punggung ekonomi Nasional. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa krisis ekonomi tahun 1970-an yang memunculkan efek buruk terhadap kondisi perekonomian Indonesia, khususnya Industri Besar. Namun tidak bagi kondisi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang justru mampu meningkatkan produktivitasnya melalui peningkatan perekonomian daerah.



Hingga saat ini, sektor IKM tercatat terus mengalami peningkatan dan turut mendominasi struktur industri di Indonesia. (Kemenperin, 2018) mengungkapkan, jumlah unit usaha IKM di dalam negeri terus meningkat setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2013, sebanyak 3,43 juta IKM naik menjadi 3,52 juta IKM pada tahun 2014. Kemudian, mampu mencapai 3,68 juta IKM di tahun 2015, dan bertambah lagi hingga 4,41 juta unit usaha pada tahun 2016. Pada triwulan II tahun 2017, jumlah IKM berada di angka 4,59 juta unit usaha. Perkembangan unit usaha tersebut berhasil mendorong daya serap tenaga kerja, yang mana pada tahun 2016 jumlah tenaga yang terserap pada sektor IKM mencapai 10,1 juta orang sekaligus mampu mendominasi dari populasi dan tenaga kerja industri di Indonesia. Data lainnya yang dapat menggambarkan perkembangan IKM saat ini adalah melalui pertumbuhan produksi yang sudah disajikan sebagaimana grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

**Grafik 1.1 Perbandingan pertumbuhan Produksi Tahunan Industri Mikro dan Kecil yoy (2010=100) Nasional dan Provinsi, Tahun 2012-2019**



Jika kita amati dan bandingkan, perkembangan pertumbuhan produksi dari sektor Industri Kecil dan Menengah ditingkat Nasional pada tahun 2012-2019 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup stabil yaitu berada pada angka 4-7 yoy% dengan kenaikan dan penurun tidak mencapai 100%. Pada tahun 2013, pertumbuhan produksi tahunan IKM sempat meningkat 46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2014, produksi tahunan IKM menurun 53% yoy. Tahun 2015, pertumbuhan produksi tahunan IKM naik 14 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2016, pertumbuhan produksi tahunan IKM menurun 1% menjadi 5,78 yoy%. Tahun 2017, pertumbuhan produksi tahunan menurun 22% menjadi 4,74. Tahun 2018, pertumbuhan produksi tahunan IKM meningkat 16% menjadi 5,66 dan pada tahun 2019, pertumbuhan produksi tahunan IKM meningkat 2% berada pada angka 5,8 yoy%.

Sementara itu, kondisi perkembangan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, mencerminkan kondisi yang fluktuatif dengan jumlah kenaikan dan penurunan yang mencapai lebih dari 100%. Seperti halnya pada tahun 2013, kenaikan melonjak tinggi hingga mencapai 85% dan berada pada angka 11,52%. Tahun 2014, produksi tahunan IKM menurun 73% menjadi 1,38 yoy%. Tahun 2015, produksi tahunan IKM meningkat 44% menjadi 2,48 yoy%. Tahun 2016, produksi tahunan IKM turun 60% menjadi 1,55 yoy%. Tahun 2017, produksi tahunan IKM kembali mengalami penurunan 44% menjadi 1,08 yoy%. Tahun 2018, produksi tahunan IKM naik 23% menjadi 1,4 dan tahun 2019, produksi tahunan IKM kembali mengalami peningkatan 83% menjadi 8,48 yoy%.



Kondisi fluktuatif tersebut, dapat disebabkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi Industri Kecil dan Menengah di Jawa Barat, diantaranya seperti; kemampuan manajerial, pengalaman, kemampuan untuk mengakses pasar input maupun output, serta pemanfaatan teknologi produksi yang dalam pelaksanaannya tentu terdapat perbedaan antara pelaku Industri Kecil dan Menengah satu dengan lainnya. Ada pula faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya lonjakan kenaikan dan penurunan produksi pada Industri Kecil dan Menengah di Jawa Barat, seperti halnya dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah maupun swasta, dan kondisi perekonomian Nasional yang fluktuatif baik permintaan pasar domestik maupun pasar global. Sementara itu, pertumbuhan produksi tahunan IKM secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Pertumbuhan Produksi Tahunan Industri Mikro dan Kecil  
Y on Y (2010=100) menurut Provinsi,  
Tahun 2012-2019**

Provinsi	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ACEH	2.20	-6.39	9.27	3.36	2.42	20.99	8.14	12.19
SUMATERA								
UTARA	0.70	3.38	4.61	6.06	10.75	0.66	7.90	9.01
SUMATERA BARAT	-2.91	7.56	-2.33	1.92	3.98	-2.58	2.33	6.75
RIAU	-3.20	4.76	5.02	-3.14	-2.09	11.15	9.23	8.02
JAMBI	11.59	-0.71	1.51	9.21	5.35	13.82	6.56	3.13
SUMATERA								
SELATAN	2.51	1.61	5.75	-7.81	8.28	5.21	0.99	10.84
BENGKULU	-6.22	-3.67	9.18	8.11	7.78	10.59	11.67	2.14
LAMPUNG	4.36	-3.52	4.13	9.06	6.76	1.26	3.08	3.59



*Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui  
Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah)*

Provinsi	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KEP. BANGKA								
BELITUNG	1.14	-0.48	0.25	-4.97	-8.60	8.27	2.48	6.92
KEP. RIAU	-3.01	1.81	8.64	12.85	0.76	9.65	20.31	21.04
DKI JAKARTA	6.97	13.29	6.86	11.43	11.69	16.95	21.40	8.57
JAWA BARAT	1.73	11.52	1.38	2.48	-1.55	1.08	1.40	8.48
JAWA TENGAH	4.41	10.53	3.41	6.57	2.60	-3.35	2.88	5.13
DI YOGYAKARTA	-5.27	12.35	3.96	3.83	6.35	15.01	7.15	1.37
JAWA TIMUR	4.77	8.98	4.48	5.79	2.53	3.12	10.88	7.53
BANTEN	10.74	0.55	6.81	2.30	10.64	20.87	6.70	8.06
BALI	-1.68	18.89	4.80	13.80	11.56	4.11	13.23	11.86
NUSA TENGGARA								
BARAT	5.42	6.47	6.26	-7.27	-3.98	-0.07	14.37	8.15
NUSA TENGGARA								
TIMUR	5.29	-1.76	2.96	6.03	15.99	25.60	28.20	23.76
KALIMANTAN								
BARAT	6.96	6.04	-0.36	5.35	1.83	3.98	7.54	4.13
KALIMANTAN								
TENGAH	-4.32	-4.87	4.74	10.77	2.78	20.80	3.89	7.40
KALIMANTAN								
SELATAN	-0.50	8.58	4.91	8.67	14.61	17.19	22.94	9.70
KALIMANTAN								
TIMUR	-4.21	10.56	2.69	2.33	17.33	7.58	43.30	11.49
KALIMANTAN								
UTARA	-	-	-	9.87	29.81	26.87	8.89	5.10
SULAWESI UTARA	-5.12	0.61	3.57	4.31	1.64	4.99	9.63	7.93
SULAWESI								
TENGAH	9.44	4.16	14.20	6.56	14.69	5.18	17.12	17.26
SULAWESI								
SELATAN	10.41	-6.54	11.53	2.12	4.08	-0.01	13.22	16.62
SULAWESI								
TENGGARA	7.86	5.15	15.08	0.37	9.58	18.94	33.31	20.15
GORONTALO	-2.94	14.60	1.53	14.90	15.63	15.63	42.65	31.24
SULAWESI BARAT	4.65	1.29	5.40	14.91	20.39	20.34	7.77	28.30
MALUKU	2.92	6	7.52	20.35	23.55	17.61	16.86	13.66
MALUKU UTARA	3.33	18.09	9.32	14.87	24.19	21.86	24.01	-3.54
PAPUA BARAT	5.56	-5.17	6.10	16.44	9.77	4.31	0.76	21.28



Provinsi	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PAPUA	-1.68	-2.59	2.03	8.03	15.79	19.13	-3.98	7.65
INDONESIA	4.06	7.51	4.91	5.71	5.78	4.74	5.66	5.80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan data pada Grafik. 1.1, dan Tabel 1.1, maka dapat diketahui perkembangan Industri Kecil Menengah yang telah mendominasi sektor perindustrian dan perekonomian di Indonesia. Oleh karenanya, Pemerintah saat ini terus melakukan pergerakan upaya strategis untuk pengembangan IKM di Indonesia, seperti halnya antara lain:

1. Pengembangan IKM diupayakan sejalan dengan penguatan struktur industri dengan memperbesar keterkaitan antara industri besar dengan IKM, melalui insentif kepada industri besar agar lebih melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya;
2. Meningkatkan akses IKM terhadap sumber pembiayaan dengan mendorong perbankan menciptakan sistem pembiayaan yang lebih fleksibel dan mengakomodir sifat IKM. Fasilitasi bagi terbentuknya Modal Ventura oleh industri besar;
3. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui *procurement* dan pemasaran bersama.
4. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak paten bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
5. Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
6. Peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendampingan, magang dan studi banding;



7. Peningkatan teknologi melalui restrukturisasi mesin peralatan IKM;
8. Peningkatan kualitas produk melalui fasilitasi penerapan standar produk-produk IKM.

#### **D. Perkembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon**

Agenda pembangunan bidang Industri Kecil dan Menengah pada dasarnya merupakan refleksi dari cita-cita membangun perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kabupaten Cirebon merupakan wilayah yang memiliki jumlah industri terbanyak jika dibandingkan dengan wilayah yang ada di lingkungan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan).

Berdasarkan data pada (Disperdagin, 2019), jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 terpantau mengalami pertumbuhan 1,68% atau meningkat sebanyak 244 unit Industri Kecil dan Menengah dibanding tahun 2017. Hal tersebut tercermin pada pertumbuhan berbagai indikator perkembangan Industri Kecil dan Menengah lainnya seperti kemampuan menyerap tenaga kerja yang tumbuh 5,03% atau meningkat sebanyak 4.148 orang dibanding dengan tahun 2017. Dengan berkembangnya jumlah unit Industri Kecil dan Menengah yang tersebar di Kabupaten Cirebon, maka kemampuan untuk menyerap tenaga kerja akan semakin meningkat mengingat kegiatan operasional Industri Kecil dan Menengah yang lebih dominan menggunakan tenaga kerja manusia dibanding dengan tenaga mesin sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Cirebon.



Selain itu, adanya peningkatan jumlah nilai investasi secara teori dianggap telah mendorong volume dan pendorong produksi. Hal ini dibuktikan berdasarkan data pada (Disperdagin, 2019) mengenai nilai investasi pada Industri Kecil dan Menengah yang tumbuh 4,90% atau meningkat Rp. 24.304.114,00 dibanding tahun 2017 yang diiringi dengan peningkatan nilai produksi pada IKM tumbuh 4,06% atau meningkat Rp. 99.429.952,00. Adanya peningkatan nilai produksi juga berpotensi untuk meningkatkan kemampuan ekspor komoditi industri. Seperti yang diketahui bahwa kemampuan ekspor komoditi industri meningkat sampai pada angka 58,9% atau meningkat Rp. 376.552.443,70 jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Perkembangan pada beberapa indikator IKM tersebut tentunya telah kontribusi secara penting bagi perekonomian daerah. Secara teori, peningkatan jumlah nilai investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru yang kemudian menyebabkan terjadinya kemampuan produksi sehingga volume dan nilai produksi meningkat dan jumlah kesempatan tenaga kerja akan bertambah. Hal ini pula yang kemudian mendorong adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sandika, dkk., 2014). Kabupaten Cirebon sendiri, dalam perkembangan industrinya memiliki beberapa sentra industri kecil, yang telah tersebar sampai pada pelosok Kabupaten Cirebon. Adapun daftar sentra industri secara rinci dapat dilihat sebagaimana berikut:



**Tabel 1.2 Daftar Sentra Industri Kecil di  
Kabupaten Cirebon**

No	Jenis Industri	Desa	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Ikan Asin	Mertasinga	Gunungjati	45	125
2	Ikan Asin	Bungko	Kapetakan	42	127
3	Ikan Asin	Bungko Lor	Kapetakan	47	96
4	Ikan Asin	Gebang Mekar	Gebang	35	70
5	Ikan Pindang	Gunungsari	Waled	40	80
6	Ikan Pindang	Mekarsari	Waled	95	190
7	Ikan Pindang	Orimalang	Jamblang	95	190
8	Ikan Pindang	Wangunharja	Jamblang	175	350
9	Ikan Pindang	Jemaras Lor	Klangenan	35	70
10	Ikan Pindang	Kebarepan	Plumbon	25	30
11	Pengolahan Kerang & Rajungan	Mertasinga	Gunungjati	30	60
12	Pengolahan Kerang & Rajungan	Sir nabaya	Gunungjati	30	60
13	Rajungan	Waruduwur	Mundu	20	40
14	Emping Melinjo	Tuk	Kedawung	55	570
15	Emping Melinjo	Astana	Gunungjati	37	462
16	Emping Melinjo	Gintung Ranjeng	Ciwaringin	40	482
17	Kerupuk Aci	Lurah	Plumbon	30	150
18	Kerupuk Aci	Setu Kulon	Weru	20	144
19	Kerupuk Aci	Damarguna	Ciledug	15	70
20	Minyak Kacang	Cirebon Girang	Talun	15	60
21	Sohun	Luwung	Mundu	25	500
22	Kue/Makanan Ringan	Weru Kidul	Weru	140	700



No	Jenis Industri	Desa	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja
23	Kue/Makanan Ringan	Panembahan	Plered	87	435
24	Roti dan Kue	Weru Kidul	Weru	155	775
25	Kue Gapit	Battembat	Tengahatani	32	120
26	Makanan (Industri)	Sumber	Sumber	81	2.629
27	Tahu	Kemantren	Sumber	34	112
28	Tahu	Danawinangun	Klangenan	63	252
29	Tahu	Kasugengan Lor	Depok	22	77
30	Tahu	Cipeujeuh Wetan	Lemahabang	51	192
31	Tahu	Cipeujeuh Kulon	Lemahabang	22	71
32	Tempe	Gegunung	Sumber	35	128
33	Tempe	Waruroyom	Depok	43	134
34	Tempe	Kasugengan Kidul	Depok	28	84
35	Tempe	Pabuaran Lor	Pabuaran	30	180
36	Tempe	Pabuaran Kidul	Pabuaran	23	55
37	Tempe	Sindang Laut	Lemahabang	31	105
38	Tempe	Wanasaba Kidul	Talun	32	176
39	Tempe	Dukupuntang	Dukupuntang	20	99
40	Telur Asin	Karanganyar	Panguragan	50	100
41	Telur Asin	Kalianyar	Panguragan	75	150
42	Telur Asin	Babakan	Gunungjati	30	60
43	Kerupuk Lantak	Gegunung	Sumber	15	80
44	Cingcau/Cuing	Babakan Losari	Pabedilan	125	250
45	Cingcau/Cuing	Babakan Losari Lor	Pabedilan	20	40



*Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui  
Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah)*

No	Jenis Industri	Desa	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja
46	Sandal Karet	Kebarepan	Plumbon	20	125
47	Pelampung Karet	Kebarepan	Plumbon	1	3
48	Batik Tulis/Cap	Trusmi Wetan	Plered	76	416
49	Batik Tulis/Cap	Trusmi Kulon	Plered	87	500
50	Batik Tulis/Cap	Panembahan	Plered	26	245
51	Batik Tulis/Cap	Gamel	Plered	17	188
52	Batik Tulis/Cap	Wotgali	Plered	53	137
53	Batik Tulis/Cap	Kalibaru	Tengahtani	43	344
54	Batik Tulis/Cap	Kalitengah	Tengahtani	77	521
55	Batik Tulis/Cap	Ciwaringin	Ciwaringin	123	102
56	Batik Tulis/Cap	Sarabau	Plered	16	167
57	Batik Tulis/Cap	Weru	Weru	2	5
58	Batik Tulis/Cap	Marikangen	Plumbon	1	3
59	Konveksi/ Pakaian Jadi	Tegalbugubug	Arjawinangun	50	250
60	Konveksi/ Pakaian Jadi	Tegalbugubug Lor	Arjawinangun	30	123
61	Konveksi/ Pakaian Jadi	Kedongdong	Susukan	35	150
62	Konveksi/ Pakaian Jadi	Perbutulan	Sumber	55	175
63	Konveksi/ Pakaian Jadi	Weru	Weru	2	-
64	Garam Krosok	Bungko	Kapetakan	40	160
65	Garam Krosok	Pegagan	Kapetakan	236	708
66	Garam Krosok	Waruduwur	Mundu	63	132
67	Garam Krosok	Kanci	Astanajapura	60	180
68	Garam Krosok	Pengarengan	Pangenan	412	1.236
69	Garam Krosok	Rawaurip	Pangenan	415	1.245
70	Garam Krosok	Bandengan	Astanajapura	140	420
71	Garam Krosok	Ender	Pangenan	30	90



No	Jenis Industri	Desa	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja
72	Garam Krosok	Kalisari	Losari	90	270
73	Garam Krosok	Ambulu	Losari	28	70
74	Garam Krosok	Citemu	Mundu	20	60
75	Meubel Kayu	Kaliwulu	Plered	75	300
76	Meubel Kayu	Wotgali	Plered	42	276
77	Meubel Kayu	Gamel	Plered	22	161
78	Meubel Kayu	Warugede	Depok	85	340
79	Meubel Kayu	Cikeduk	Depok	235	705
80	Meubel Kayu	Sindang Mekar	Dukupuntang	117	468
81	Kapur Tohor	Gempol	Ciwaringin	10	50
82	Bata Merah	Curug	Susukan Lebak	40	200
83	Bata Merah	Babakan Losari	Pabedilan	35	101
84	Bata Merah	Jatiseeng Kidul	Pabuaran	50	140
85	Bata Merah	Arjawinangun	Arjawinangun	25	60
86	Bata Merah	Cilengkrang	Pasaleman	31	106
87	Bata Merah	Ambit	Waled	17	51
88	Genteng	Budur	Ciwaringin	37	375
89	Batu Alam	Warugede	Depok	37	196
90	Batu Alam	Warujaya	Depok	23	156
91	Batu Alam	Cikeduk	Depok	1	7
92	Batu Alam	Bobos	Dukupuntang	70	402
93	Batu Alam	Balad	Dukupuntang	41	228
94	Batu Alam	Cikalahang	Dukupuntang	33	171
95	Batu Alam	Cipanas	Dukupuntang	28	137
96	Batu Alam	Cangkoak	Dukupuntang	26	241
97	Batu Alam	Kepunduan	Dukupuntang	17	92
98	Batu Alam	Kedongdong	Dukupuntang	9	48
99	Batu Alam	Girinata	Dukupuntang	9	42
100	Batu Alam	Dukupuntang	Dukupuntang	2	24
101	Batu Alam	Cikeusal	Gempol	9	39



*Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui  
Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah)*

No	Jenis Industri	Desa	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja
102	Batu Alam	Kepuh	Palimanan	22	110
103	Batu Alam	Cupang	Gempol	10	100
104	Batu Alam	Balerante	Palimanan	13	73
105	Kesed	Galagamba	Ciwaringin	25	50
106	Anyaman Bambu	Greged	Greged	30	90
107	Anyaman Bambu	Halimpu	Beber	25	75
108	Anyaman Bambu	Cipanas	Dukupuntang	45	135
109	Anyaman Bambu	Jatiseeng	Ciledug	23	50
110	Anyaman Bambu	Nanggela	Greged	25	50
111	Anyaman Bambu	Cipinang	Beber	60	40
112	Anyaman Bambu	Warujaya	Depok	75	225
113	Anyaman Bambu	Gembongan	Babakan	75	150
114	Kerajinan Rotan	Cangkring	Plered	60	252
115	Kerajinan Rotan	Karang Sari	Weru	57	250
116	Kerajinan Rotan	Tegalsari	Plered	253	2.600
117	Kerajinan Rotan	Tegalwangi	Weru	526	3.220
118	Kerajinan Rotan	Bodesari	Plumbon	95	1.200
119	Kerajinan Rotan	Bode Lor	Plumbon	73	900
120	Kerajinan Rotan	Gombang	Plumbon	51	864
121	Kerajinan Rotan	Lurah	Plumbon	38	570
122	Kerajinan Rotan	Pamijahan	Plumbon	46	475
123	Kerajinan Rotan	Marikangen	Plumbon	39	1.250
124	Kerajinan Rotan	Non Sentra		67	-
125	Kerajinan Kulit Kerang	Tegalkarang	Palimanan	1	20
126	Kerajinan Kulit Kerang	Astapada	Tengahtani	1	681
127	Tikar Adem	Kedungdalem	Gegesik	15	30
128	Mainan Anak-anak	Jemaras Kidul	Klangenan	45	175



No	Jenis Industri	Desa	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja
129	Mainan Anak-anak	Kejiwan	Susukan	50	150
130	Gerabah/ Keramik	Sitiwinangun	Jamblang	25	58
131	Gerabah/ Keramik	Astanamukti	Pangenan	27	81
132	Gerabah/ Keramik	Ciledug Lor	Ciledug	40	110
133	Gerabah/ Keramik	Arjawinangun	Arjawinangun	20	45
134	Kerajinan Tembaga	Walahaar	Gempol	30	60
135	Pande Besi	Jemaras	Klangenan	35	105
136	Kompur	Serang	Klangenan	5	25
137	Kompur	Bobos	Dukupuntang	10	50
138	Rokok Kretek	Astanalanggar	Losari	25	250
139	Rokok Kretek	Barisan	Losari	10	100
140	Minyak Atsiri (Industri)	Marikangen	Plumbon	1	-
141	Minyak Atsiri (Industri)	Tonjong	Waled	1	-
142	Minyak Atsiri (Industri)	Kanci	Kanci	1	-
143	Logam (Tembaga dan AL)	Walahaar	Gempol	31	70
144	Sapu Ijuk	Beber	Patapan	60	80
<b>Jumlah</b>				<b>7.735</b>	<b>38.890</b>

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, 2017

Keterangan : Tidak termasuk industri menengah dan besar



# BAB 2

## PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia memegang peranan utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Seiring dengan perkembangannya, IKM tentu tidak lepas dari berbagai permasalahan pelik yang membelit IKM saat ini. Mulai dari permasalahan permodalan, pemasaran, manajemen usaha, pengelolaan lingkungan, sampai pada permasalahan teknologi. Berbagai permasalahan kompleks tersebut dapat berakibat pada rendahnya kinerja IKM dibandingkan dengan Industri Besar (Anshori, 2005). Oleh sebab itu, diperlukan adanya sinergitas dari berbagai pihak, termasuk regulasi dan kebijakan yang tidak hanya dijalankan oleh Pemerintah Pusat namun juga seluruh satuan kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya akan dibahas sebagaimana berikut.



### **A. Regulasi dan Kebijakan Industri Kecil dan Menengah**

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 3 yang didalamnya termasuk untuk Industri Kecil dan Menengah, disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Agar didapatkan pemberdayaan UKM yang sesuai dengan tujuannya. Maka dibutuhkan prinsip-prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dari berikut:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.



Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang didukung oleh peran serta secara aktif dari pelaku usaha dan masyarakat untuk menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

1. Pendanaan

Aspek pendanaan yang dimaksud adalah untuk:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- d. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.
2. Sarana dan prasarana  
Aspek sarana dan prasarana yang dimaksud adalah ditujukan untuk:
    - a. Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
    - b. Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.
  3. Informasi usaha  
Aspek informasi usaha sebagaimana yang dimaksud adalah untuk:
    - a. Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
    - b. Mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
    - c. Memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.



#### 4. Kemitraan

Aspek pendanaan yang dimaksud adalah ditujukan untuk:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

#### 5. Perizinan usaha

Aspek perizinan usaha yang dimaksud adalah untuk:

- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. Membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.

#### 6. Kesempatan berusaha

Aspek kesempatan ditujukan untuk:

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra



- industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha mikro dan kecil di subsektor perdagangan retail;
  - c. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
  - d. Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - e. Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - f. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil melalui pengadaan secara langsung;
  - g. Memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah dan pemerintah daerah; dan
  - h. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Promosi dagang
- Aspek promosi dagang ditujukan untuk:
- a. Meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;



- b. Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- c. Memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. Memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud adalah dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### 8. Dukungan kelembagaan.

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud adalah ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam hal pengembangan usaha IKM, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha pada beberapa hal, diantaranya:

- 1. Produksi dan pengolahan, yaitu dilakukan dengan cara:
  - a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;



- b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
  - d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah
2. Pemasaran, yaitu dengan cara:
- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
  - b. Menyebarluaskan informasi pasar;
  - c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
  - d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha mikro dan kecil;
  - e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
  - f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
3. Sumber daya manusia, dilakukan dengan cara:
- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
  - b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
  - c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.



4. Desain dan teknologi, dilakukan melalui:
  - a. Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
  - b. Meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
  - c. Meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
  - d. Memberikan insentif kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - e. Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Dalam rangka mendukung pengembangan IKM, maka pemerintah dan pemerintah daerah, pemerintah juga diamanatkan untuk membantu pembiayaan dan penjaminan IKM. Berikut penjelasannya:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan
2. Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
3. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
4. Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.



5. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
6. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Upaya pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sumber pembiayaan, adalah berupa:

1. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
2. Pengembangan lembaga modal ventura;
3. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
4. Peningkatan kerja sama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
5. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

- a. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;



- b. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
- c. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit adalah dengan cara:

- a. Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. Mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

## **B. Peran Pemerintah Pusat**

Pemerintah pusat yang dalam hal ini menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diantaranya



terdiri dari Presiden beserta para Menteri yang berperan sebagai induk dari pemerintahan, berwenang dalam mengatur kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara menyeluruh, seperti halnya mengatur dalam bidang pertahanan, keamanan, kehakiman, moneter dan fiskal, politik luar dan dalam negeri, bidang agama, dan mencakup kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Visi dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam hal pelaksanaan visi tersebut jelas terlihat bahwa pemerintah memegang peranan vital untuk mengembangkan IKM. Disebutkan dalam (Wilantara & Susilawati, 2016) bahwasanya pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi kelompok marginal yang berpotensi adanya kerentanan ekonomi, minimalnya agar mereka mampu berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan pasar.

Peran pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap kelompok masyarakat marginal dapat dilakukan melalui program pemberdayaan dan pemberantasan kemiskinan. Langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah pusat adalah dengan menyusun perencanaan pembangunan apakah telah berpihak pada kalangan masyarakat miskin ataukah justru sebaliknya. Bukan hanya itu, pemerintah juga perlu untuk memantau ataupun mengevaluasi dari hasil pembangunan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tentu hanya dapat menjalankannya dengan bekerja sama, bersama-



sama dengan dan dari berbagai sektor pembangunan terkait seperti halnya melakukan perluasan kerja, sehingga dapat menghasilkan pemerataan pembangunan namun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang layak (pro growth) dan lebih merata.

Salah satu bentuk peranan pemerintah pusat dalam melakukan program pemberdayaan dan pemberantasan kemiskinan adalah melalui pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Pertumbuhan dan pembangunan Usaha Kecil dan Menengah termasuk Industri Kecil dan Menengah diantaranya adalah salah satu motor penggerak upaya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di berbagai banyak negara di dunia. Industri Kecil dan Menengah sudah terbukti mampu menopang guncangan dan gangguan kondisi stabilitas perekonomian nasional.

Usaha-usaha pengembangan dan peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah perlu dilakukan pemerintah sebagai jalan meningkatkan pertumbuhannya. Dalam hal ini pemerintah tidak hanya perlu mengkaji namun juga perlu melakukan pergerakan terkait permasalahan, peluang maupun tantangan peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah saat ini. Pada hakikatnya Pemerintah bukanlah penentu utama mengembangkan Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing. Peran pemerintah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor didalamnya yang kemudian berdampak pada terbentuknya peluang pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang unggul sehingga dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Faktor-faktor tersebut dikenal dengan istilah empat atribut utama penentu terbentuknya peluang pengembangan Industri dalam suatu negara. Diantaranya *pertama* yaitu, kondisi faktor



produksi, Pemerintah perlu mengetahui permasalahan IKM terlebih dahulu sebelum menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pengembangan Industri Kecil Menengah di Indonesia. Dengan diketahuinya permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka Pemerintah dapat mempengaruhi kondisi faktor pengembangan Industri Kecil dan Menengah seperti melalui kebijakan-kebijakan yang dapat dikeluarkan dan ditetapkan Pemerintah berupa kebijakan pendidikan, kebijakan subsidi dan kebijakan permodalan lainnya yang secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dan kapasitas produktivitas yang dapat menentukan daya saing dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Indonesia.

*Kedua*, Kondisi permintaan domestik. Pemerintah berperan untuk menentukan standar produk unggulan Industri Kecil dan Menengah yang kemudian berpengaruh pada peluang permintaan atas perilaku dan kebutuhan pembeli termasuk pemerintah sebagai pembeli domestik. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan faktor keunggulan kompetitif produk seperti inovasi dan kemajuan teknologi agar dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan permintaan pasar global utamanya permintaan pasar domestik.

*Ketiga*, Kondisi strategi, struktur dan tingkat persaingan perusahaan industri. Pemerintah dapat berperan untuk menentukan regulasi-regulasi subsidi, kebijakan pajak yang kemudian berpengaruh pada strategi, struktur organisasi dan tingkat persaingan yang terbentuk didalamnya. Penetapan kebijakan pajak ini berdampak pada biaya produksi sekaligus pada persaingan yang terjadi di lapangan. Dengan semakin rumit dan tingginya beban pungutan yang ditetapkan kepada para pelaku industri, maka akan



semakin memberatkan biaya produksi dan terjadinya sistem birokrasi dan perda yang menyulitkan persaingan industri di Indonesia.

*Keempat*, Kondisi industri terkait termasuk industri-industri pendukung. Industri-industri pendukung di sini adalah industri yang menghasilkan barang maupun jasa bukan untuk memenuhi kebutuhan produksinya sendiri, akan tetapi untuk dapat dijual ke industri/pasar bebas guna mendukung proses penciptaan barang maupun jasa yang akhirnya memiliki nilai tambah pada produksi barang maupun jasa tersebut. Kondisi industri-industri di lingkungan yang dapat mendukung industri-industri pada suatu wilayah tertentu dengan melalui penentuan regulasi dan pengawasan media periklanan sehingga dapat mengubah faktor permintaan dan kondisi persaingan Industri Kecil dan Menengah.

Berikut merupakan beberapa peranan pemerintah dalam hal pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Indonesia:

1. Penguatan kapasitas sektor informal

Sektor informal merupakan bagian strategis di dalam sistem perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan sektor informal mengisi setidaknya dua pertiga dari seluruh sektor perekonomian nasional. Pada kenyataannya sektor informal semakin menunjukkan perkembangannya seiring dengan tidak terbendungnya para pekerja di sektor formal. Sektor informal mampu menurunkan angka pengangguran dan memberikan peluang pada sebagian masyarakat yang memiliki keterampilan dan pendidikan rendah. Sebagian besar di antara sektor informal tersebut merupakan berasal dari sektor usaha mikro kecil termasuk Industri Kecil dan Menengah.



Penguatan kapasitas sektor informal perlu pemerintah lakukan seiring dengan eksistensinya tersebut. Dalam hal ini pemerintah dapat mempermudah akses tata ruang yang lebih mudah dijangkau oleh para pekerja sektor informal. Menyusun kebijakan dan program yang mendukung mobilitas sumber daya para pelaku Industri Kecil dan Menengah. Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga untuk penguatan di bidang promosi. Selain itu, pemerintah juga dapat mendukung melalui bantuan permodalan dengan skim pembiayaan berbunga rendah sebagai upaya peningkatan daya tahan ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah pada sektor informal.

## 2. Peningkatan infrastruktur

Peningkatan infrastruktur akan sangat berdampak pada cepat lambatnya pembangunan kesejahteraan ekonomi pada suatu negara. Tersedianya infrastruktur sebagai pendukung mobilisasi usaha pada sektor Industri akan sangat membantu meningkatkan gairah usaha pada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memperoleh peluang dan penghasilan kerja, memperbaiki kapasitas perekonomian melalui adanya peningkatan dinamika kelompok usaha. Dalam hal peningkatan infrastruktur, pemerintah berperan untuk menyusun strategi dan kebijakan sektor pembangunan, memberikan dana anggaran belanja serta mengawasi keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur, serta yang terpenting adalah mengawasi pembangunan infrastruktur agar dapat melindungi hak rakyat dan mampu menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan penunjang pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Indonesia.



### 3. Penguatan kelembagaan usaha

Peningkatan kelembagaan usaha dapat dilakukan dengan cara menjalin kerja sama melalui berbagai pihak swasta sebagai upaya membentuk dan menumbuhkan budaya ekonomi yang mandiri dan inovatif. Pemerintah pusat dapat melakukan pengembangan pusat-pusat pelatihan dan pendidikan, pengembangan kerja sama antar Industri Kecil dan Menengah dengan seluruh jaringan usaha dan para pemangku kepentingan yang bersangkutan. Dalam hal ini akan terjadi transfer informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produktivitas Industri Kecil Menengah sekaligus memperluas agregasi usaha Industri Kecil Menengah yang mandiri dan berdaya saing.

### 4. Peningkatan iklim usaha

Peranan pemerintah dalam mendukung pengembangan Industri Kecil dan Menengah dapat dilakukan dengan menciptakan iklim usaha yang efisien dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan akselerasi kebijakan, perundang-undangan dan birokrasi. Akselerasi kebijakan dan perundang-undangan dapat ditempuh dengan cara penyesuaian ketetapan kebijakan ketenagakerjaan, izin usaha, pajak, retribusi dan pungutan biaya lainnya yang dapat memberatkan biaya ekonomi para pelaku Industri Kecil dan Menengah. Selain itu, pemerintah juga dapat menegaskan pelarangan praktik monopoli dan persaingan ilegal yang tidak sehat dan berkeadilan guna optimalisasi layanan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha dan persaingan usaha Industri Kecil dan Menengah yang sehat dan kuat.



### **C. Peran Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang meliputi Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kewenangannya adalah tidak mencakup dalam kewenangan mengatur dalam bidang pertahanan, keamanan, kehakiman, moneter dan fiskal, politik luar dan dalam negeri, bidang agama, serta bidang lainnya.

Indonesia merupakan negara hukum dan Negara kesatuan. Ketentuan konstitusional ini mengandung makna bahwa negara Indonesia dibangun dalam bentuk kesatuan, bukan negara federasi. Oleh karena itu, pemerintahan di Indonesia menganut sistem desentralisasi yang dijalankan atas dasar otonomi dengan seluas-luasnya. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa lepas dari bingkai negara kesatuan. Tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan menganut pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagaimana Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 (Yusdianto, 2015).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya yang juga didukung oleh masyarakat yang dari dan berada di daerah tersebut untuk mengelola sumber daya melalui kerja sama dengan tujuan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah sehingga dapat terwujud kemandirian, dan kesejahteraan daerah (Asryad, 2010). Salah satu indikator yang dapat berpotensi untuk

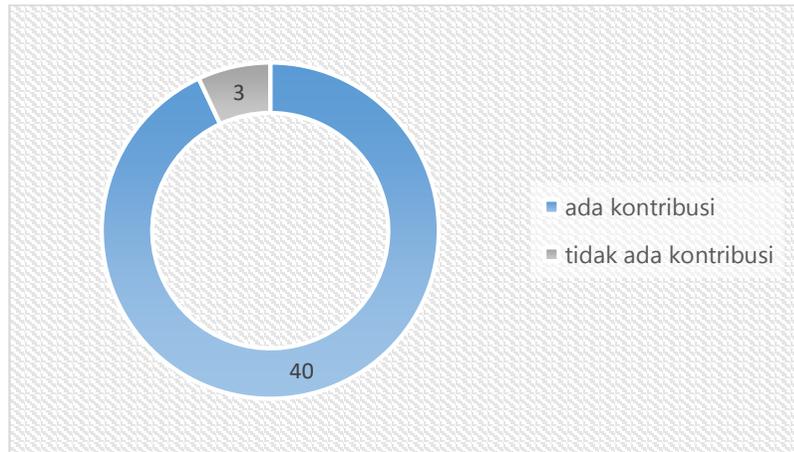


meningkatkan dan membangun ekonomi daerah, yang dalam hal ini Kabupaten Cirebon adalah melalui pemberdayaan IKM. Pemberdayaan IKM adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu maupun masyarakat agar dapat terberdaya, melalui proses demokratis sehingga dapat membangun diri dan lingkungan guna meningkatkan kualitas kehidupan mandiri dan sejahtera.

Dalam upaya pemberdayaan IKM, pemerintah daerah berperan sebagai pembuat dan pelaksana program, serta penyelenggara berbagai bantuan kepada pelaku IKM. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan, pembinaan, pendampingan, serta berbagai program pemberdayaan IKM seperti kegiatan promosi, fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran dan SDM agar dapat menyejahterakan perekonomian daerah. Hal ini tentunya sangatlah penting untuk merealisasikan upaya tersebut mengingat komitmen pemerintah dalam menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai Kabupaten Halal.

Berdasarkan hasil studi empirik, ditemukan bukti bahwa pada 43 responden, yang mana 40 (93%) responden diantaranya menyatakan telah merasakan peran maupun kontribusi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas usaha responden. Selebihnya, hanya terdapat 3 (7%) responden saja yang menyatakan tidak merasakan peran dan kontribusi pemerintah daerah dimaksud (Gambar 2.1). Hal tersebut secara tidak langsung membuktikan semangat dan bukti atas komitmen pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai Kabupaten Halal.





Sumber: Data Primer, 2019 (diolah)

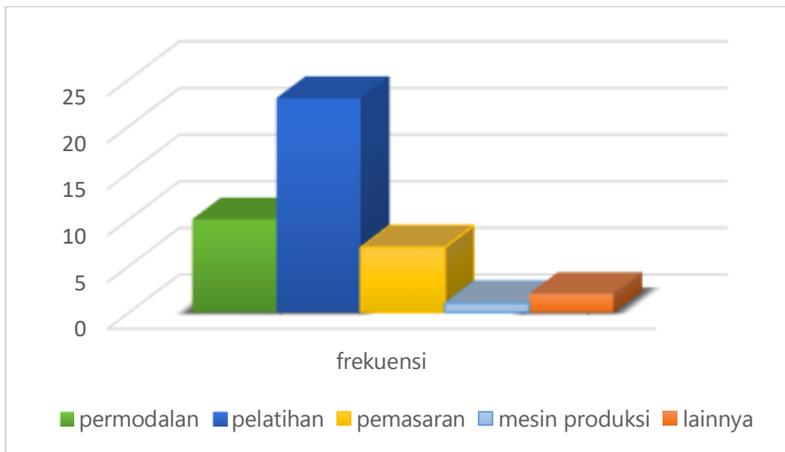
**Gambar 2.1 Peran dan Kontribusi Pemerintah**

Adapun terkait dengan bentuk kontribusi pemerintah yang dimaksud, diketahui pada gambar 4.11 di bawah ini, terdapat 23 (53.5%) responden menyatakan berupa bantuan penyelenggaraan pelatihan. 10 (23.3%) responden menyatakan berupa bantuan pemberian modal, 7 (16.3%) responden mengungkapkan berupa bantuan pemasaran, 1 (2.3%) responden menyatakan berupa bantuan mesin produksi, dan 2 (4.7%) responden lainnya menyatakan bantuan lain-lain seperti pembinaan pengembangan produk dan fasilitasi legalitas produk.

Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon pada setiap tahunnya rutin memfasilitasi layanan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) secara gratis untuk para pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Cirebon. Tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas IRT agar sesuai dengan standar kelayakan produk yang telah ditetapkan Dinkes



khususnya pada produk makanan olahan, sekaligus membantu memperkuat daya tahan promosi sebagai upaya perluasan produk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaannya, Disperdagin memanfaatkan bantuan kecanggihan Teknologi Informasi sehingga masyarakat terdorong untuk melekat teknologi ditengah berkembangnya era digital sekarang ini.



*Sumber: Data Primer, 2019 (diolah)*

**Gambar 2.2 Bentuk kontribusi pemerintah**

Berbagai bentuk bantuan kontribusi pemerintah daerah telah dirasakan oleh para pelaku IKM. Harapannya, bentuk nyata atas bantuan tersebut akan terus dapat diselenggarakan pemerintah daerah seiring dengan komitmen Kabupaten Cirebon menuju Kabupaten Halal. Dengan adanya bantuan kontribusi pemerintah, setidaknya akan dapat melahirkan semangat yang bersinergi antara masyarakat pelaku IKM dan Pemerintah agar dapat bersama-sama mendukung Kabupaten Cirebon menuju Kabupaten Halal.



Adapun strategi yang dapat dijadikan pilihan dalam penentu kebijakan pengembangan IKM, pemerintah dapat mempertimbangkan prioritas sebagaimana berikut:

**Tabel 2.1 Hierarki Variabel IKM Halal  
Kabupaten Cirebon**

Urutan Prioritas Level Kedua (Variabel)		
Prioritas	Variabel	Bobot (%)
P1	Ketersediaan Bahan Baku	12,90
P2	Ketersediaan Alat dan Mesin	12,90
P3	Adanya Permintaan Pasar	11,58
P4	Pengalaman Usaha	11,23
P5	Keterampilan	7,98
P6	Modal Sendiri	7,08
P7	Harga yang bersaing	6,03
P8	Tingkat Pendidikan	5,73
P9	Kegiatan Promosi	5,23
P10	Ketersediaan Akses Perbankan	4,23
P11	Kegiatan Pembinaan	2,85
P12	Penggunaan Akuntansi dalam Usaha	2,75
P13	Peraturan dan Regulasi	2,22
P14	Kepemilikan Sertifikat Halal	1,97
P15	Kepemilikan Sertifikat PIRT	1,96
P16	Penyediaan Informasi	1,77
P17	Akses Permodalan	1,61
Jumlah		100,00

Sumber: Data Primer, 2019 (diolah)



Dari hasil analisis hirarki proses mengenai strategi-strategi prioritas guna meningkatkan daya saing IKM Halal di Kabupaten Cirebon secara keseluruhan diketahui bahwa aspek Produksi, aspek SDM, serta aspek Pasar dan Pemasaran menjadi inti dari prioritas pengembangan IKM Halal di Kabupaten Cirebon. Hal ini sejalan dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon menyatakan bahwa salah satu potensi terkuat dari pengembangan IKM adalah aspek produksi.

Dengan semakin meningkatnya jumlah Industri Kecil dan Menengah di Industri Indonesia, maka Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu mengembangkan Industri Kecil dan Menengah secara intensif dan berkelanjutan (sustainable). Sifatnya yang berbasis masyarakat, yang mana dalam pelaksanaan produksi maupun pengelolaan langsung melibatkan masyarakat, tentu akan membantu meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat yang berdampak secara langsung pada perekonomian daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



# BAB 3

## INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT

Sejalan dengan Visi Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2015 - 2019 yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka Industri Kecil dan Menengah (IKM) telah dianggap sebagai indikator strategis dalam pengembangan perekonomian nasional. Dalam hal ini Menteri Perindustrian menegaskan beberapa strateginya untuk menguatkan IKM yang diarahkan untuk tujuan jangka menengah guna mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat, melalui pengentasan pengangguran dan kemiskinan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, penulis mencoba membahasnya pada beberapa poin seperti berikut.



### **A. Peran IKM dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perekonomian rakyat telah menjadi perhatian bersama, terutama pada kondisi perubahan cepat sebagai dampak globalisasi yang kian menuntut masyarakat agar dapat menyejajarkan kerja kerasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Industri Kecil dan Menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri pada dan oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kegiatan ini telah banyak digeluti masyarakat Indonesia bahkan masyarakat di daerah pelosok karena kemudahannya yang tidak memerlukan sarana dan fasilitas berskala besar dalam menjalannya usahanya.

Pembinaan dan pengembangan IKM di Indonesia bertujuan agar mewujudkan kesempatan berusaha, kesempatan untuk bekerja, menguatkan struktur industri dengan adanya keterlibatan antara industri kecil, menengah dan besar, melestarikan kesenian/budaya kearifan lokal, mewujudkan sistem distribusi barang yang efisien, meningkatkan aktivitas masyarakat pada setiap daerah, meningkatkan pembangunan di setiap daerah, serta meningkatkan pemasaran dalam dan luar negeri (Nu'man, 2005).

IKM yang telah menjangkau daerah pelosok, mampu menyerap tenaga kerja pada masyarakat di daerah pelosok sehingga mereka tidak perlu lagi menggantungkan perekonomiannya di Kota untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak. Selain itu, dengan banyaknya IKM yang tersebar pada berbagai wilayah di Indonesia, menyebabkan IKM mampu menciptakan pemerataan tingkat perekonomian masyarakat dan telah menjadi bagian terbesar sebagai pelaku dunia per pasaran, maka tidak heran jika pemerintahan saat ini sedang gencar melakukan berbagai upaya



pergerakan untuk meningkatkan peran strategisnya dalam perekonomian Nasional. (Majestrik., dkk., 2001) menambahkan bahwa IKM berperan sebagai penghasil produk akhir yang dibutuhkan oleh konsumen, dan bisa pula sebagai IKM penghasil produk yang digunakan sebagai bahan baku oleh industri lain. Peranan sebagai penyedia bahan baku ini penting dalam menjaga keberlangsungan sektor industri secara menyeluruh.

Dalam proses industri, terutama industri kecil dan menengah yang telah banyak tersebar pada berbagai wilayah Indonesia, akan sangat membantu meningkatkan nilai tambah perekonomian, adanya tambahan pemasukan maka akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat. Perkembangan sektor industri dalam pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peranan dan keberadaan sektor industri kecil menengah beserta kerajinan rakyatnya. Secara historis, dalam (Yasin, 2003) dijelaskan bahwa kehadiran industri kecil menengah jauh lebih terdahulu jika dibandingkan industri-industri modern masa kini. Meskipun penghasilan industri kecil menengah pada umumnya masih tergolong rendah, namun eksistensinya tidak dapat diabaikan termasuk dalam kondisi perekonomian yang tengah melemah sekalipun.

Berbagai literatur telah banyak membahas dan membuktikan bahwa UMKM yang dalam hal ini termasuk Industri Kecil Dan Menengah mampu menjadi tumpuan pembangunan perekonomian masyarakat, karena keunggulannya yang mampu bertahan di tengah gejolak perekonomian. Sebagaimana yang kita ketahui pada tahun 1997 silam, krisis moneter telah melanda Indonesia yang kemudian terus berlangsung sampai menjadi krisis ekonomi karena telah



melumpuhkan banyak kegiatan ekonomi, seperti tutupnya banyak perusahaan-perusahaan besar dan meningkatnya jumlah angka pengangguran. Namun ditengah keterpurukan tersebut, IKM tetap dapat bertahan (Ratnasari, 2013) bahkan jumlahnya semakin meningkat paska terjadinya krisis ekonomi.

Dalam menunjang pembangunan ekonomi masyarakat, Pemerintah terlebih dahulu perlu melakukan berbagai upaya pembangunan ekonomi salah satunya adalah peningkatan/pertumbuhan ekonomi, berikut indikatornya:

1. Sumber daya manusia

Sumber daya adalah salah satu determinasi yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi. Manusia dalam hakikatnya berfungsi sebagai penggerak pembangunan yang mengantisipasi masalah, membuat perencanaan, mempertimbangkan sistem nilai agama dan masyarakat, membangun organisasi sosial, politik dan ekonomi.

2. Sumber dana

Dalam pandangan Islam, dana/materi hanya dianggap sebagai jalan dan bukan satu-satunya tujuan dan penyebab terjadinya setiap kejadian. Materi hanya menjadi jalan untuk merealisasikan kebutuhan untuk menjalankan setiap kewajiban dan manfaat yang tidak cukup bagi manusia. Oleh karenanya dalam peningkatan perekonomian masyarakat, Pemerintah tidak hanya membutuhkan dana/materi yang sedikit dan perlu adanya kesinambungan dan berkembang kapitalnya.

3. Sumber daya alam

Allah telah menyediakan sumber daya alam yang melimpah dan hampir tidak terbatas agar dimanfaatkan manusia sebagai



khalifah untuk mengatur, memanfaatkan dan memberdayakan alam sebagai pemenuh kebutuhan manusia. Namun berbeda dalam pandangan konvensional, yang tidak terbatas adalah keinginan manusia sementara sumber daya alamnya terbatas. Oleh karena itu, dalam pandangan ekonomi Islam, krisis ekonomi bukanlah disebabkan karena terbatasnya sumber daya alam, melainkan karena tidak meratanya distribusi yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Maka dari itu, untuk dapat meningkatkan perekonomian, manusia dituntut untuk dapat memanfaatkan segala sumber daya alam tersebut (Mawardi, 2007).

#### 4. Perubahan teknologi

Teknologi adalah keseluruhan metode ilmiah yang kian terjadi. Hal yang menjadi pendukung bertahannya IKM dijelaskan dalam (Partomo & Soejodono, 2004) yaitu diantaranya: karena sebagian besar IKM memproduksi barang dan jasa yang elastisitas permintaannya rendah. Faktor pendukung lainnya yaitu karena modal yang dipergunakan para pelaku IKM berasal dari modal sendiri, bukan dari lembaga keuangan bank maupun non bank sehingga kenaikan suku bunga tidak berpengaruh pada pelaku IKM. Selain itu, krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan banyaknya pekerja sektor formal yang menjadi pengangguran sehingga jumlah pelaku IKM semakin meningkat.

Peran IKM yang telah tersebar di daerah pelosok dikenal sebagai tambahan sumber pendapatan keluarga dan juga sebagai penunjang kegiatan pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat pedesaan. Karena peran industri pedesaan yang demikian, maka pengembangan industri pedesaan



mempunyai arti penting dalam usaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan atau dengan kata lain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan (Mubyarto, 1997). Berikut merupakan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dalam hal sebagai berikut ini:

1. Mampu melahirkan calon pembeli maupun penjual yang secara bersama-sama berperan menyebarkan informasi kualitas produk yang dilakukan secara memadai.
2. Mampu menyerap tenaga kerja secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
3. Menurunkan permintaan barang impor, dalam hal ini Industri Kecil Menengah berpotensi mendorong pertumbuhan barang domestik dan meningkatkan jumlah ekspor.
4. Tersebar nya IKM di seluruh negeri dapat berdampak pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki standar hidup masyarakat.

#### **B. Peran IKM dalam Solusi Mengatasi Pengangguran**

Problematis mengenai pengangguran tentu bukanlah hal yang baru dan telah diketahui bersama kompleksitasnya. Rendahnya daya serap tenaga kerja di Indonesia menyebabkan problematis tersebut tidak dapat hanya diselesaikan melalui satu indikator saja. Diperlukan solusi yang tepat untuk mengurangi jumlah pengangguran yang dalam setiap harinya cenderung menunjukkan peningkatan. Upaya pemerintah dalam penurunan angka pengangguran juga bukan sesuatu hal yang baru. Sejak paska terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 silam, setiap upaya penanggulangan pengangguran tidak jarang selalu dikaitkan



dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengingat permasalahan tersebut memang harus berkaitan dengan kegiatan banyak orang.

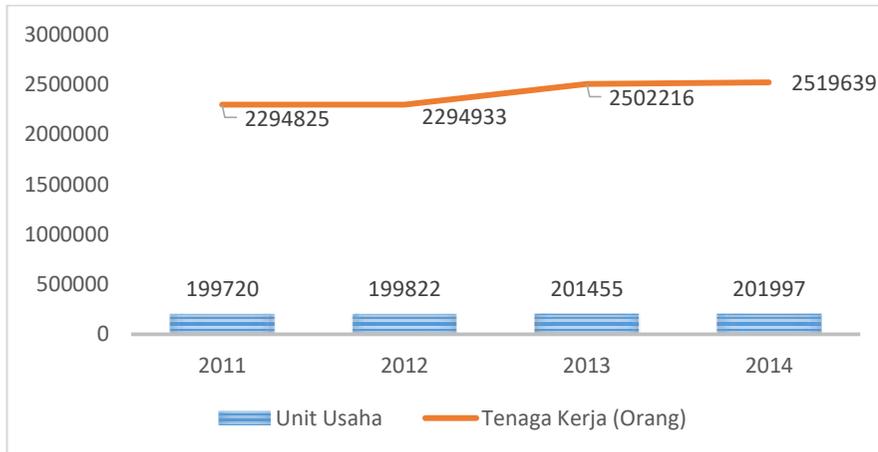
Salah satu bentuk aktualisasi pemerintah dalam mendorong ekonomi kerakyatan adalah melalui IKM. IKM muncul dan menjadi salah satu perwujudan nyata dari kegiatan ekonomi rakyat yang bertumpu pada kemandirian, keberagaman, terdesentralisasi dan mampu menjadi harapan Indonesia termasuk menjadi penyelamat pada masa terjadinya krisis moneter bahkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada Tahun 1998 sampai Tahun 1999.

Tumbuhnya jumlah Industri Kecil dan Menengah saat ini menjadi langkah perbaikan ekonomi Nasional termasuk dalam hal menciptakan lapangan kerja. Jika dilihat berdasarkan data pada (BPS, 2016) bahwa jumlah tenaga kerja Industri Mikro dan Kecil di Indonesia pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 4% menjadi 8.735.781 (orang) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 sebanyak 8.362.746 (orang).

Data (Disperindag Jabar, 2020) juga menunjukkan tren yang sama dengan pergerakan peningkatan jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah Nasional. Seiring dengan meningkatnya jumlah



**Tabel 3.1 Perkembangan Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja  
Industri Kecil dan Menengah Jawa Barat,  
Tahun 2011-2014**



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Barat, 2020

Data tersebut mencerminkan peranan IKM yang telah terbukti berhasil menyerap tenaga kerja sehingga mampu menurunkan angka pengangguran sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Adapun perkembangan IKM di Kabupaten Cirebon sendiri, seperti yang dilansir (Disperdagin, 2019) berdasarkan data perkembangan Industri di Kabupaten Cirebon Tahun 2017 sampai pada Tahun 2018 IKM telah mampu menyerap 4.148 orang atau meningkat 5.03% dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat disebabkan karena dalam operasional kerja pada sektor Industri Kecil dan Menengah masih bersifat tradisional sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja masih sangat banyak diperlukan untuk menunjang proses produksi.



Kemampuan IKM dalam menyerap tenaga kerja memang telah banyak dibuktikan pada berbagai macam sumber data. Namun seiring dengan kemampuannya tersebut, kualitas penyerapan tenaga kerja juga penting menjadi perhatian Pemerintah agar IKM dapat berkontribusi membangun perekonomian beriringan dengan penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.

Untuk mendukung peningkatan kualitas penyerapan tenaga kerja, perlu adanya kerja sama atau sinergitas dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat yang berkesinambungan. Seperti halnya pemanfaatan tenaga kerja yang lebih efektif guna peningkatan produktivitas nasional mengingat produktivitas ekonomi nasional selalu bertumpu pada sudut pendayagunaan tenaga kerja yang berkemampuan dan berkualitas, misalnya saja dengan memberikan akses pelatihan dan pendampingan bagi para pekerja, memberikan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga kualitas mereka dapat terangkat setidaknya untuk mengembangkan pribadi masyarakat itu sendiri.

Pelatihan dan pendampingan di sini merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang terencana berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, keahlian dan sikap para pekerja yang didapat melalui teori maupun pengalaman-pengalaman. Adapun menurut (Zurnali, 2004) beberapa manfaat dari adanya kegiatan pelatihan adalah untuk membantu meningkatkan pengetahuan atas budaya perusahaan dan bagaimana kondisi eksistensi para pesaing luar, membantu memastikan budaya perusahaan menekankan pada inovasi, kreativitas dan pembelajaran. Membantu pekerja agar dapat bekerja dengan teknologi baru. Menjamin keselamatan dengan



memberikan cara-cara baru kepada para pekerja sehingga mereka dapat tetap berkontribusi terhadap perusahaan sebagaimana kepentingan yang suatu saat berubah dan keahlian yang sifatnya absolut. Serta mempersiapkan para pekerja agar dapat menerima dan bekerja secara efektif dan efisien.

Dalam kondisi ini, pemerintah maupun pemilik perusahaan merupakan elemen dari sistem perencanaan tenaga kerja yang kuat serta mekanisme pelaksanaannya dalam hal membantu meningkatkan kualitas pekerja IKM seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dunia industri. Dengan penggunaan tenaga kerja yang berkualitas, maka besar kemungkinan produktivitas tenaga kerja akan meningkat, nilai ekspor akan bertambah, tingkat upah para pekerja IKM juga ikut meningkat yang artinya peran adanya IKM untuk mendorong angka pengangguran akan terus berlanjut menjadi sebagai pemberantas kemiskinan.



Berikut merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada UMKM termasuk Industri Kecil Menengah, yaitu:

1. Modal

Modal dibagi menjadi dua kategori yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap yaitu modal yang digunakan untuk melakukan proses produksi dalam jangka waktu yang relatif panjang yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Sementara modal lancar adalah modal yang digunakan untuk melakukan proses produksi, berupa bahan-bahan baku dan kebutuhan lain yang dianggap sebagai penunjang usaha. Modal sering dianggap sebagai salah satu faktor penentu kegiatan produksi demikian pula dengan penggunaan tenaga kerja. Modal dalam hal ini bukan saja meliputi pengeluaran dan pembelanjaan bahan baku namun juga termasuk pembelanjaan perlengkapan alat dan mesin produksi guna menunjang kegiatan produksi barang dan jasa.

2. Usia usaha

Usia usaha merupakan periode usaha yang telah dijalani oleh pelaku IKM dalam menjalankan usahanya. Usia usaha dapat berpengaruh pada pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha atas pengalamannya terkait dengan dunia usaha yang telah dilalui baik mengenai perilaku konsumen maupun kebutuhan proses produksi. Dengan banyaknya pengalaman usaha yang telah didapat, maka besar kemungkinan dapat berpengaruh pada tingkat pendapatan dan kemampuan produktivitas yang kemudian akan berbanding lurus dengan peningkatan angka penyerapan tenaga kerja.



### 3. Nilai produksi

Nilai produksi adalah output yang dihasilkan dari serangkaian proses produksi secara keseluruhan sampai ke tangan konsumen. Naik turunnya nilai produksi suatu usaha biasanya dipengaruhi oleh banyaknya permintaan hasil produksi. Meningkatnya hasil/nilai produksi yang dihasilkan oleh suatu usaha termasuk dalam hal ini adalah Industri Kecil dan Menengah, pelaku usaha cenderung akan meningkatkan output usaha tersebut dengan cara menambah kapasitas produksinya demikian pula dengan penambahan jumlah tenaga kerja atau peningkatan permintaan tenaga kerja.

### 4. Tingkat upah

Upah yaitu imbalan atas pekerjaan yang telah atau akan dilakukan dengan berdasarkan persetujuan maupun ketetapan peraturan Perundang-undangan dan berfungsi untuk menjalankan kelangsungan kegiatan usaha. Tingkat upah dapat menjadi standar kebijakan penyerapan tenaga kerja. Dengan meningkatnya tingkat rata-rata upah, maka secara langsung biaya produksi juga ikut meningkat. Biaya produksi yang meningkat akan berpengaruh pada harga produk dan akan menurunkan kemampuan daya beli konsumen. Daya beli konsumen yang menurun akan menyebabkan pelaku IKM untuk menurunkan jumlah produksinya sehingga dapat menimbulkan terjadinya penurunan kemampuan dalam menyerap tenaga kerja.



### **C. Peran IKM dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat**

Sektor industri dan perdagangan merupakan salah satu sektor penting perekonomian suatu negara, karena sektor ini tidak hanya mampu berfungsi menjadi roda penggerak perekonomian negara, namun juga mampu menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, dimana sektor industri yang dapat dikembangkan lebih menonjolkan aspek-aspek ekonomi tanpa mempersoalkan apakah industri tersebut menciptakan impor bahan baku, barang modal dan impor jasa lanjutan (Nu'man, 2005).

Eksistensi IKM dalam perspektif pembangunan masyarakat, dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan pemanfaatan sumber daya misalnya, melalui pendekatan ini, sumber daya yang ada di lingkungan masyarakat dapat di dayagunakan dan di mobilisasi melalui sedemikian rupa untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Dalam (Soetomo, 2009) dijelaskan bahwa dengan banyaknya sumber daya manusia yang memanfaatkan sumber daya alam untuk melakukan berbagai kegiatan produksi diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan mendorong dan memberikan potensi iklim yang kondusif bagi perkembangan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat termasuk perbaikan pada bidang kesejahteraan masyarakat.

Banyaknya IKM yang tersebar pada wilayah pelosok, menjadikan IKM berpotensi untuk memberdayakan sekaligus melibatkan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif untuk bersinergi bersama pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bahwa IKM merupakan kelompok industri usaha yang karakteristik penghasilan usahanya masuk dalam kategori menengah ke bawah. Bergerak di



sektor informal dengan sebagian besar kelompok berasal dari keluarga yang sederhana. Bahkan tidak jarang pelaku IKM masih ada yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dengan tersebarnya IKM di daerah pelosok, besar kemungkinan IKM dapat memanfaatkan aneka ragam sumber daya alam sebagai bahan baku lokal untuk menghasilkan produk dan jasa bagi masyarakat yang secara langsung dapat menunjang kegiatan usaha yang berskala lebih besar serta dapat menumbuhkan usaha lokal maupun sektor suatu daerah.

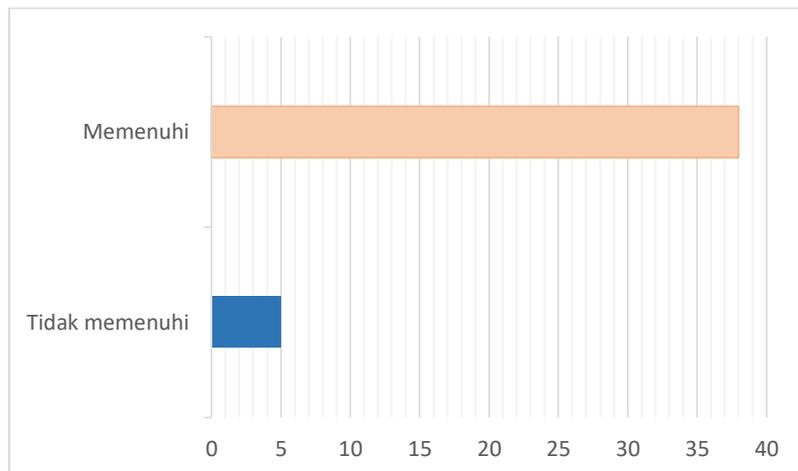
Peran pemerintah dalam pengembangan IKM tidak secara langsung dapat menjadi faktor penentu keunggulan daya saing maupun wilayah. Peran Pemerintah dapat sebagai penentu iklim usaha, penentu faktor kondisi permintaan (melalui kebijakan moneter dan keuangan) serta mengatur sistem perdagangan. Terdapat 4 (empat) penentu keunggulan daya saing menurut (Nu'man, 2005) adalah sebagai berikut:

1. Standar ketetapan produk unggulan yang telah ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan kebutuhan masyarakat selaku pembeli/konsumen.
2. Industri pendukung lain yang dapat membangun sebuah sistem pengembangan industri pada suatu wilayah karena dapat mempengaruhi kebutuhan dan permintaan konsumen termasuk masyarakat.
3. Kondisi permintaan dipengaruhi melalui penentuan standar produk unggulan lokal yang mempengaruhi kebutuhan pembeli, termasuk pemerintah yang juga merupakan pembeli beberapa produk domestik.



4. Industri-industri pendukung dan industri terkait dalam suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh kewenangan pemerintah dalam mengontrol media periklanan dan penetapan regulasi.
5. Strategi perusahaan, struktur, dan persaingannya dipengaruhi oleh pemerintah melalui berbagai perangkat seperti regulasi pasar modal, kebijakan pajak, dan kemampuan

Sebagaimana peran IKM dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, berikut ini penulis mencoba membahas hasil temuan studi empirik mengenai kemampuan pelaku IKM dalam memenuhi kebutuhan. Sebanyak 38 (88.4%) responden total 43 pelaku IKM yang menjadi responden menyatakan telah mampu memenuhi kebutuhan hidup. Namun 5 (11.6%) responden lainnya menyatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup.



Sumber: Data Primer, 2019 (diolah)

**Gambar 3.1 Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Hidup**



Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan merupakan sebuah ukuran minimal dalam keberhasilan pelaku usaha menjalankan perdagangannya. Tujuan pelaku usaha untuk melakukan usahanya tentu terlebih dulu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan berikutnya dapat berupa pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan produksi dalam menjalankan usahanya.

Dengan ditemukannya beberapa responden yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pemerintah dapat berupaya untuk meningkatkan motivasi dan inovasi para pelaku usaha, melakukan pembinaan dan pendampingan agar terus semangat menjalankan usahanya dan turut serta berperan mendukung peningkatan daya saing IKM di Indonesia termasuk di Kabupaten Cirebon.

Selain itu, kegiatan pemberdayaan terhadap Industri kecil dan menengah juga dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan tersebut, dengan cara menetapkan suatu strategi untuk pengembangan industri di pedesaan. Cara tersebut biasanya ditempuh melalui sinergitas masyarakat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi sehingga muncullah berbagai bentuk kewenangan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan mengelola pembangunan secara mandiri. (Soetomo, 2009) membahas mengenai pentingnya dua unsur dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu de-sentralisasi dan pengembangan kapasitas. Desentralisasi di sini dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah atau dengan kata lain *give power or authority*. Sementara pengembangan kapasitas, berarti *to give ability* atau memberikan kesempatan untuk



ikut me-ngontribusikan kemampuan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat di lingkungan tersebut.

Dalam (OJK, 2006) mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dijelaskan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Dalam hal pemberdayaan, didalamnya dilakukan kegiatan pembinaan yang mana didalamnya melakukan kegiatan pembinaan kemanusiaan dan pembinaan keahlian. Kemampuan kemanusiaan dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat baik rohani maupun jasmani, sementara itu pembinaan keahlian dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pekerja dalam menjalankan kegiatan-nya agar dapat secara bersama-sama mencetak sumber daya yang profesional sehingga dapat mencapai produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam bekerja.

Industri Kecil dan Menengah sebagai penyedia jasa berfungsi dan berperan penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan Industri Kecil dan menengah akan menjadi sumber penghidupan bagi beberapa pihak masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, pelaku industri yang dalam



hal ini para pekerja masyarakat dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sekelompok orang yang mampu bekerja dengan baik. Tenaga kerja adalah sekelompok orang yang mampu bekerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya usaha kecil menjadikan masyarakat mendapatkan akses untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka memperoleh pendapatan.

Nilai tambah yang dihasilkan para pelaku IKM dapat meningkatkan keunggulan yang ada pada suatu daerah sesuai dengan keunggulan letak geografisnya ataupun para pelaku IKM itu sendiri. Kondisi ini tentu menjadi nilai tambah bagi produk daerah. Adanya IKM juga dapat menghasilkan pendapatan bagi beberapa pihak sehingga dengan pendapatan tersebut pemerataan terhadap dapat dirasakan oleh beberapa masyarakat. Lebih lanjut, pemerataan pendapatan dapat meningkatkan pula taraf hidup masyarakat. Jika suatu program pelatihan dapat berjalan dengan baik, maka kemampuan pekerja dalam melaksanakan tugas akan meningkat. Selain itu, perilaku para pekerja juga akan cenderung berubah menjadi lebih baik seiring dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pekerja tersebut yang didapat selama kegiatan pelatihan dan pendampingan.



# BAB 4

## PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Industri Kecil dan Menengah merupakan sektor yang sangat berperan strategis dalam mendorong pergerakan ekonomi Nasional. Keberadaan IKM saat ini juga kian mengalami peningkatan, termasuk di Kota/Kabupaten Cirebon. Dalam bab ini penulis akan mengungkap sejauh mana perkembangan IKM secara Nasional maupun Regional. Namun sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui pengertian IKM terlebih dahulu, agar dengannya kita lebih mudah memahami Industri Kecil dan Menengah secara mendalam.

### **A. Peluang dan Tantangan IKM di Indonesia Secara Umum**

Perencanaan pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak harus dimiliki oleh setiap daerah dengan tujuan me-ngoimalkan sekaligus menyinergikan penggunaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi serta segala sumber daya lainnya yang dimiliki guna tercapainya sasaran pembangunan yang dicita-citakan bersama oleh seluruh masyarakat, yaitu peningkatan dan pemerataan kesejahteraan.

Pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan. Pembangunan juga perlu dipisahkan dari konsep per-tumbuhan dimana pembangunan merupakan konsep yang lebih luas yang



secara simultan melibatkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup. Lebih jauh Endriatmo Soetarto dalam (BHMN, 2010) menyatakan bahwa pembangunan berarti peningkatan kapasitas untuk bertindak (*capacity to act*), berinovasi dan menghadapi keadaan yang berbeda. Jadi dalam konteks ini, pembangunan ini melibatkan pula transformasi bukan hanya perubahan.

Disinilah faktor waktu dan ruang sangat berperan dalam mempengaruhi pembangunan karena proses transformasi memerlukan waktu dan dalam ruang yang berbeda. Pembangunan juga lebih memfokuskan pada *equity* dari pada *equality*. Kedua konsep ini sangat berbeda dalam implikasinya. Konteks pembangunan tidak semua orang tidak semua orang harus menerima barang dan jasa dengan ukuran yang sama, namun lebih kepada bagaimana barang dan jasa tersebut, sekecil apa pun sesuai dengan kapasitas orang dan masyarakat tersebut.

Dalam perencanaan pembangunan yang baik, harus didasarkan sesuai dengan karakteristik wilayah guna mengetahui akan fungsi dan kemampuan wilayah tersebut. Perencanaan pembangunan saat ini dihadapkan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunan yang berorientasi pada penyediaan aksesibilitasnya namun juga kemandirian ekonominya.

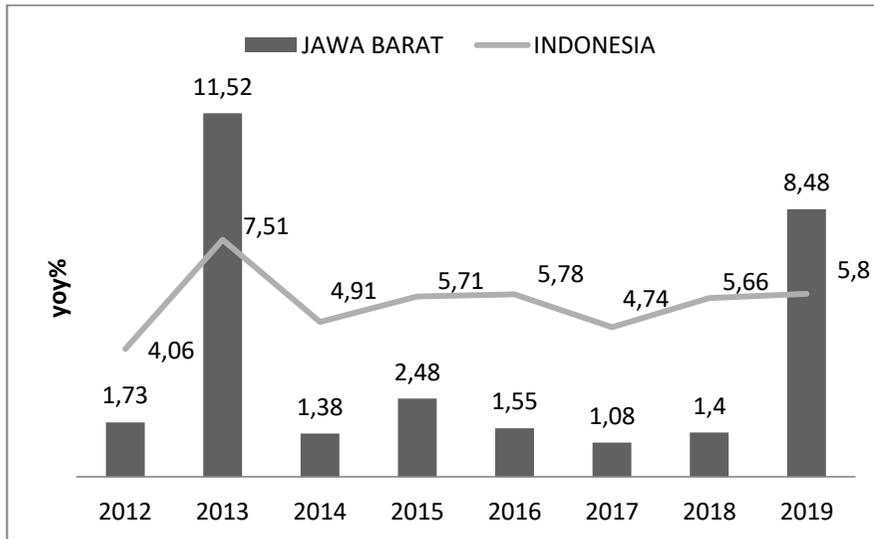
Dua ratus enam puluh juta lebih penduduk yang tersebar di wilayah dengan kondisi geografis yang unik seperti Negara Indonesia dengan kelimpahan sumber daya alam yang berpotensi untuk diolah menjadi bahan usaha maupun industri, menjadikan Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah pilihan yang tepat sebagai upaya untuk menyejahterakan rakyatnya. Terlebih lagi dengan tersedianya



infrastruktur antar pulau yang sedikit terbatas, menyebabkan perekonomian tidak akan mungkin hanya dilakukan dan mengandalkan perusahaan-perusahaan besar saja, sehingga diperlukan hadir dan peranan perusahaan-perusahaan kecil untuk kemudian dapat ikut serta memegang kendali perekonomian masyarakat (Aca., dkk., 2007).

Perkembangan pergerakan Industri Kecil Menengah di Indonesia dapat dilihat pada berbagai aspek baik aspek tenaga kerja maupun aspek produksi. Perkembangan industri pada aspek tenaga dapat dilihat berdasarkan jumlah tenaga kerja dan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan tenaga kerja tersebut, sedangkan perkembangan industri pada aspek produksi dapat dilihat berdasarkan jumlah perusahaan, nilai output dan nilai input, serta produksi tahunan sebagai gambaran kegiatan produksi atas kenaikan maupun penurunan hasil produksi IKM di Indonesia. Berdasarkan grafik 4.1 di bawah ini, dapat dilihat perkembangan produksi tahunan industri mikro dan kecil (2010=100) tahun 2012 sampai tahun 2019 secara Nasional dan Regional. Perkembangan produksi Industri Mikro dan Kecil Indonesia maupun Provinsi Jawa Barat cenderung menunjukkan pergerakan yang tidak stabil dari tahun ke tahun.





Sumber Badan Pusat Statistik, 2020

**Grafik 4.1 Pertumbuhan Produksi Tahunan Industri Mikro dan Kecil (2010=100) di Indonesia dan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2012-2019**

Pertumbuhan produksi tahunan Industri Mikro dan Kecil di Indonesia pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 mengalami peningkatan yang relatif tinggi sebesar 85% menjadi 7,51 (yoy%), kemudian menurun 35% menjadi 4,91 (yoy%) pada tahun 2014 dan terus mengalami ketidakstabilan pada tahun-tahun berikutnya dengan rata-rata perubahan mencapai 10% pada setiap tahun periode tahun 2012 sampai tahun 2019. Kondisi perkembangan pertumbuhan produksi tahunan Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Jawa Barat tidak jauh berbeda dibandingkan kondisi pergerakan produksi tahunan Industri Mikro dan Kecil secara Nasional. Pergerakannya justru lebih menunjukkan kondisi ketidak-stabilan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan produksi tahunan Industri Mikro



dan Kecil Jawa Barat pada tahun 2013 melonjak tinggi sampai 566% menjadi 11,52 (yoy%) jika dibandingkan tahun 2012, kemudian menurun 88% menjadi 1,38 (yoy%) pada tahun 2014. dan terus mengalami ketidakstabilan pada tahun-tahun berikutnya dengan rata-rata perubahan mencapai 146% pada setiap tahun periode tahun 2012 sampai tahun 2019.

Meskipun demikian, pergerakan industri berdasarkan perkembangan produksi tahunan Industri Mikro dan Kecil secara keseluruhan pada dua tahun terakhir (tahun 2018 dan tahun 2019) cenderung menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan angka produksi tahunan Industri Mikro dan Kecil di Indonesia maupun Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan produksi tahunan Industri Mikro dan Kecil Indonesia pada tahun 2018 meningkat 19% menjadi 5,66 (yoy%) dibandingkan dengan tahun 2017 dan pada tahun 2019 meningkat 2% menjadi 5,8 (yoy%). Sedangkan pertumbuhan produksi tahunan Industri Mikro dan Kecil Jawa Barat pada tahun 2018 meningkat 30% menjadi 1,4 (yoy%) dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat tinggi sebesar 506% menjadi 8,48 (yoy%). Kondisi tersebut telah mengindikasikan bahwa kinerja produksi Industri Mikro dan Kecil secara Nasional dan Regional pada tahun 2018 dan tahun 2019 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan adanya peluang dan potensi yang nyata dalam pengembangan industri di Indonesia termasuk Industri Kecil dan Menengah.

Usaha Kecil dan Menengah termasuk IKM merupakan unsur pembangunan ekonomi yang saat ini menjadi prioritas untuk dikembangkan. IKM merupakan pilar utama dalam perekonomian Indonesia dimana karakteristik utama IKM adalah kemampuan



mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, sangat wajar jika keberhasilan IKM diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Namun tantangan dalam pengembangan IKM ke depan tidaklah mudah, butuh kerja sama dan komitmen yang baik antar pemerintah, pelaku IKM beserta para stakeholder terkait. Tantangan yang sering kali mengadang pada sektor ini antara lain mengenai hal pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, serta aspek kualitas produk dan pemasaran. Dalam hal pembiayaan, didapati banyak kendala seperti terbatasnya lembaga penyedia dana bagi IKM, kurang memudahkannya aturan yang telah ditetapkan lembaga pembiayaan, ketidakcocokan persyaratan lembaga pembiayaan dengan siklus usaha IKM, serta penyebab *mind set* dan budaya yang berkembang pada pelaku IKM itu sendiri.

Perihal kapasitas sumber daya manusia, kendala yang banyak didapati adalah terkait minimnya pengetahuan SDM untuk pengembangan IKM yang menyebabkan rendahnya penggunaan teknologi dan minimnya jumlah produk yang tersertifikasi. Masalah SDM ini tentu diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi para pelaku usaha yang menjadi tumpuan utama dalam memajukan IKM. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, pengawasan dan pendampingan kepada para pelaku IKM yang dilakukan oleh seluruh stakeholder dari lembaga pendidikan, lembaga keuangan, pemerintah, swasta, maupun lembaga terkait lainnya.





*Sumber: Data Primer, 2019*

**Gambar 4.1 Contoh Proses Produksi pada Industri Kecil dan Menengah**

Dalam hal kualitas produk dan pemasaran, dipengaruhi juga oleh kapasitas SDM dan kelembagaan. Sebagaimana yang kita ketahui pada Gambar 4.1, bahwa sebagian besar pelaku IKM masih terpaku pada proses produksi tradisional yang melibatkan banyak tenaga kerja yang diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan, intelektual dan kapasitas SDM. Hasil produksi yang dilaksanakan sesuai tradisi akan cenderung sulit untuk di standarisasi, karena kurangnya mutu, inovasi, promosi maupun pemanfaatan



kecanggihan teknologi yang kurang mendukung kepentingan pemasaran pada sektor IKM.

Terlepas dari hal-hal yang mengadang pengembangan IKM, kita perlu optimis untuk meyakini bahwa IKM akan semakin baik pada masa mendatang. Adapun faktor-faktor utama yang menentukan kecil besarnya peluang bagi pelaku IKM untuk dapat memasuki liberalistis pasar bebas menurut (Setyaningsih, 2015) adalah :

1. Akses sepenuhnya ke informasi mengenai aspek-aspek kunci bagi keberhasilan suatu usaha seperti kondisi pasar yang dilayani dan peluang pasar potensial, teknologi terbaru/terbaik yang ada di dunia, sumber-sumber modal dan cara pembiayaan yang paling efisien dan efektif, mitra kerja (misalnya, konsumen, maupun pemasok bahan baku, dan distributor), pesaing (kekuatannya, strateginya, visinya), dan kebijakan atau peraturan berlaku.

Dengan banyaknya jalur informasi komunikasi saat ini, pelaku maupun perusahaan IKM dapat saling bertukar informasi untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas pendapatan pada setiap sektor IKM dapat terkendali. Adanya sinergi yang kuat antar IKM di Indonesia juga penting untuk menggarap peluang di perdagangan online yang semakin mengalami kemajuan. Dengan begitu maka IKM akan lebih siap untuk menghadapi tantangan bersaing dengan teknologi informasi yang digunakan pesaing di pasar global.

2. Akses mendapatkan teknologi digital kini sangat dimudahkan. Berkembangnya teknologi digital sangat membantu pelaku IKM agar dapat memanfaatkan digital *commerce* untuk mempermudah menjalankan bisnisnya. Penggunaan e-



*commerce* seperti *marketplace* dapat mengetahui target pasar, cara penjualan juga mengontrol sistem pembayaran. Pelaku IKM juga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membayar biaya lapak dan biaya promosi. Perkembangan teknologi digital telah menjadi peluang bagi pelaku IKM agar dapat menjalankan bisnisnya dengan mudah dan murah. Peluang tersebut juga telah menuntut IKM untuk mampu memanfaatkan pasar nasional dan pasar internasional. Kini sudah tidak ada lagi batasan geografis untuk mampu menciptakan pasar yang lebih luas lagi. Dengan peningkatan aksesibilitas dan kapabilitas IKM, maka IKM dapat menciptakan peluang dan potensi bersaing ditengah perkembangan teknologi digital.

### 3. Akses permodalan

Permodalan merupakan permasalahan yang sering menjadi sorotan pada sebagian besar pelaku IKM dalam mengembangkan usahanya. Meskipun saat ini Pemerintah dan Lembaga Keuangan telah banyak mengeluarkan program-program bantuan pinjaman. Namun tak jarang di antara pelaku IKM merasa kesulitan untuk menjangkau sumber-sumber bantuan kredit tersebut. Hal ini bisa saja terjadi pada pelaku IKM yang berasal dari daerah terpencil yang disebabkan oleh sedikitnya sektor lembaga keuangan yang menjangkau pada daerah terpencil dan pelosok, serta rendahnya pengetahuan mengenai ke-tentuan maupun prosedur peminjaman dari bank/ lembaga keuangan lainnya. Dengan tersedianya modal usaha yang cukup, baik yang didapat dari uang tabungan sendiri, bantuan keluarga maupun lembaga keuangan maka pelaku IKM akan mampu meningkatkan kapasitas produksinya sehingga



dapat memenuhi kebutuhan pasar baik domestik maupun internasional.

4. Akses mendapatkan tenaga SDM yang terampil. Tidak bisa dipungkiri bahwa SDM merupakan salah satu faktor kendala pengembangan IKM di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam (Wijaya, 2018) mengenai beberapa kendala yang terjadi pada tenaga SDM Industri Kecil dan Menengah di tanah air adalah: kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru, kurangnya kemampuan *quality control* terhadap produk, kurangnya kemampuan membaca kebutuhan pasar, masih banyak pelaku IKM yang kurang fokus pada tujuan dan rencana strategis jangka panjang, kurangnya inovasi pada strategi marketing yang digunakan para pelaku IKM dan kurangnya pengetahuan manajerial pelaku IKM dalam mengelola permodalan. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa tenaga SDM yang berkualitas adalah kunci menghadapi era ekonomi digital yang tengah ber-langsung saat ini. Industri 4.0 yang bertumpu pada perkembangan teknologi, mengharuskan Indonesia untuk mempersiapkan SDM-SDM yang handal. Berbagai pe-mangku kepentingan dari pelaku usaha, akademisi, asosiasi pekerja, pemerintahan dan komunitas, sepakat bahwa ancaman dunia kerja yang akan digantikan oleh mesin dan teknologi menjadi tidak berarti jika suatu negara mampu membangun SDM yang handal.
5. Akses mendapatkan bahan baku  
Keterbatasan akses mendapatkan bahan baku sering kali menjadi penyebab rendahnya kualitas bahan baku yang digunakan para pelaku IKM. Kemudahan akses terhadap bahan



baku sangatlah penting bagi para pelaku IKM. Dengan terjaganya kuantitas dan kualitas bahan baku para pelaku IKM, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung sesuai dengan skala operasi IKM, maka besar kemungkinan IKM dapat berperan sebagai pionir dalam pengolahan yang menghasilkan output pada bahan baku yang ada dan memproduksi produk-produk yang berkualitas dengan kemampuan produksi yang tinggi guna memenuhi kebutuhan pelanggan pada pasar global.

#### 6. Pemasaran

Keberhasilan aspek pemasaran adalah salah satu hal penting untuk menentukan peluang pengembangan IKM pada masa mendatang. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala pengembangan IKM yang sangat kompleks seperti lemahnya kemampuan IKM untuk memperoleh peluang mendapatkan pasar dan mem-perbesar pangsa pasar, terbatasnya sistem informasi pemasaran yang menyebabkan minimnya kerja sama antar Industri Kecil dan Menengah serta kurang kondusifnya iklim usaha karena sistem persaingan yang saling mematikan menyebabkan tidak meningkatnya sistem. Dalam menghadapi beberapa fenomena tersebut, Pemerintah dan Masyarakat pelaku IKM harus melakukan kerja sama yang konkret untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan IKM yang masih kurang terpadu serta kurangnya kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap IKM.



## 7. Infrastruktur

Optimalisasi jaringan infrastruktur harus terus diupayakan untuk mengembangkan industri jasa layanan berbasis teknologi informasi, e-commerce, serta *logistics system* dengan mengandalkan kekuatan teknologi digital. Peningkatan jumlah dan kualitas infrastruktur akan membentuk konektivitas yang baik antar wilayah. Ketersediaan air baku untuk air bersih dengan cara memanfaatkan sumber daya alam juga menjadi penting sebagai kepentingan operasional IKM.

Dengan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan IKM, maka akan sangat potensial memajukan IKM. Upaya pembangunan IKM seperti pembenahan infrastruktur dan berbagai indikator lainnya perlu juga didukung oleh adanya peran dan kebijakan dari Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah. Keselarasan visi misi untuk memajukan IKM di Indonesia juga perlu dibangun mulai dari penyelenggara dan pelaksana kebijakan Pusat sampai Daerah.

8. Kebijakan atau peraturan yang berlaku baik dari pemerintah pelaku usaha/perusahaan maupun pemerintah mitra. Kebijakan dan peraturan yang berlaku di pemerintah harus melewati proses review dan revisi sehingga regulasi yang dibentuk harus sesuai dengan kondisi geografis dan berbagai aspek lainnya pada suatu daerah tertentu agar melahirkan regulasi yang tidak diskriminatif dan dapat memenuhi kepentingan Nasional. Berbagai program pendampingan pemerintah terhadap para pelaku IKM juga perlu dilakukan secara efektif untuk menerapkan tata kelola usaha yang baik.



## **B. Peluang dan Tantangan IKM di Kabupaten Cirebon**

Kabupaten Cirebon terletak pada wilayah strategis, sebagai penghubung menuju pintu keluar masuk (gate) barang dan manusia seperti jalan arteri, jalan bebas hambatan, bandar udara, dan pelabuhan mendudukkan wilayah Kabupaten Cirebon pada posisi yang paling strategis dibanding wilayah lain yang berbatasan langsung seperti Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan. Perekonomian Kabupaten Cirebon kini tumbuh dan berkembang dengan cukup pesat.

Dengan dimilikinya berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki, struktur ekonomi Kabupaten Cirebon terbentuk dengan dominasi sektor industri yang berbasis sumber daya alam. Wilayah Kabupaten Cirebon yang terdiri dari wilayah perkebunan, dataran pesawahan, hingga wilayah pesisir, menjadikan potensi ekonomi yang muncul menjadi semakin beragam. Didukung dengan posisi yang strategis, aksesibilitas yang mudah, serta sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai membuat Kabupaten Cirebon menjadi pilihan alternatif bagi para wisatawan, juga investor industri kecil, sedang bahkan besar untuk mengembangkan usahanya.

Dalam hal mengetahui tantangan dan peluang pengembangan IKM di Kabupaten Cirebon, pendekatan Analisis SWOT merupakan metode yang dapat menyusun strategi perusahaan dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ada di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan agar dapat memenangkan persaingan usaha. Dikatakan demikian karena analisis SWOT dapat menyediakan suatu informasi yang mendalam tentang kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal yang dihadapi perusahaan, sehingga perusahaan akan mempunyai



gambaran tentang keputusan strategis apa yang akan diambil (Sulistiani, 2014).

Analisis ini terbentuk atas asumsi bahwa strategi yang efektif ditentukan berdasarkan atas hasil kesesuaian yang baik antara sumber daya internal perusahaan dengan situasi eksternal perusahaan yang dapat dilihat pada empat indikator berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatan (*strengths*), meliputi kemampuan internal perusahaan, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dan melayani pelanggan. Kelemahan (*weaknesses*), seperti apa saja keterbatasan internal dan faktor-faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Peluang (*opportunities*), adalah faktor yang menguntungkan yang berasal dari lingkungan eksternal dan dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Ancaman (*threats*), yaitu faktor yang berasal dari lingkungan eksternal yang dapat menguntungkan dan memberikan tantangan bagi performa perusahaan.

Menurut Glass pada (Sulistiani, 2014) dijelaskan bahwa apabila analisis SWOT ini dilakukan secara berkelompok, maka informasi yang didapat akan lebih efektif khususnya pada saat pengadaan struktur, objektivitas, kejelasan dan fokus perusahaan dalam memenangi persaingan bisnis. Sebab, dari proses tersebut mampu menciptakan konsep strategi memenangi persaingan yang utuh sehingga permasalahan tidak akan melebar disebabkan karena pengaruh politik atau kesenangan perseorangan yang kuat. Adapun hasil analisis SWOT terkait dengan peluang dan tantangan pengembangan IKM di Kabupaten Cirebon sebagaimana hasil



temuan empirik penulis, sudah penulis rumuskan pada beberapa poin berikut:

1. Kekuatan

- Adanya sinergi yang baik antara para pelaku IKM dengan Pemerintah Daerah untuk pengembangan IKM
- Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung pengembangan IKM
- Tersedianya sumber daya alam yang melimpah
- Kebutuhan produk halal tinggi, dengan kondisi penduduk Kabupaten Cirebon yang mayoritas beragama muslim dan tingginya jumlah permintaan baik produk maupun jasa halal berpeluang untuk terus meningkatkan IKM melalui IKM Halal di Kabupaten Cirebon
- Adanya kesadaran pada sumber daya manusia untuk hidup mandiri
- IKM mengalami pertumbuhan yang pesat terutama IKM di bidang makanan

2. Kelemahan

- Banyaknya IKM yang belum bersertifikat halal
- Terdapat IKM yang belum memiliki sertifikat PIRT
- Kurangnya kemudahan akses permodalan dalam menjalankan usaha IKM
- Kurangnya akses pemasaran produk IKM di Kabupaten Cirebon
- Lemahnya pengetahuan sumber daya manusia tentang perijinan, mutu dan kualitas produk, serta strategi pengembangan produk



- Prosedur perizinan dan legalitas produk IKM dinilai kurang memudahkan
- Kurangnya pengetahuan para pelaku IKM terhadap prosedur perizinan dan legalitas Sertifikasi PIRT dan Sertifikasi Halal
- Kurangnya keterampilan manajerial usaha pelaku IKM

### 3. Peluang

- Letak geografis Kabupaten Cirebon yang strategis, yang menjadi simpul pergerakan transportasi antar provinsi Kabupaten Cirebon menjadikannya selalu dilintasi jalur perekonomian regional dan nasional.
- Dijadikannya Kabupaten Cirebon sebagai tujuan destinasi wisata
- Berkembangnya teknologi keuangan
- Meningkatnya kecanggihan teknologi dan informasi
- Mobilitas penduduk yang luas dan cepat
- Adanya Program Nasional Daerah yang mendukung

### 4. Tantangan

- Lemahnya pengetahuan konsumen terkait pentingnya produk bersertifikasi PIRT dan bersertifikasi halal
- Pasar bebas yang meningkatkan tingginya persaingan antar pelaku usaha daerah maupun luar daerah Cirebon
- Regulasi permodalan yang kurang memudahkan
- Biaya pengurusan sertifikasi halal yang relatif mahal
- Adanya persaingan antar produk makanan IKM, UMKM dan usaha dari luar wilayah Cirebon
- Kerja sama pemasaran yang masih terbatas



Dalam rangka memaksimalkan kekuatan-peluang, dan sekaligus meminimalkan kelemahan-tantangan yang telah dijelaskan di atas, berikut ini penulis paparkan rumusan strategi dalam pengembangan IKM di Kabupaten Cirebon yang dimuat pada tabel 4.1. antara lain;

**Tabel 4.1 Matriks SWOT**

	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
<b>IFAS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya sinergi yang baik antara para pelaku IKM dengan Pemerintah Daerah untuk pengembangan IKM Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung pengembangan IKM</li> <li>2. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah</li> <li>3. Kebutuhan produk halal tinggi, dengan kondisi penduduk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat IKM yang belum memiliki sertifikat PIRT</li> <li>2. Kurangnya kemudahan akses permodalan dalam menjalankan usaha IKM</li> <li>3. Prosedur perizinan dan legalitas produk IKM dinilai kurang memudahkan</li> <li>4. Kurangnya pengetahuan para pelaku IKM terhadap prosedur perizinan dan legalitas sertifikasi PIRT</li> </ol>
<b>EFAS</b>		



*Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui  
Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah)*

	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
<b>IFAS</b>	<p>4. Kabupaten Cirebon yang mayoritas beragama muslim dan tingginya jumlah permintaan baik produk maupun jasa halal berpotensi untuk terus meningkatkan IKM melalui IKM Halal di daya manusia untuk hidup mandiri</p> <p>5. IKM mengalami pertumbuhan yang pesat terutama IKM di bidang makanan</p> <p>6. Kabupaten Cirebon Adanya kesadaran pada sumber</p>	<p>dan sertifikasi Halal</p> <p>5. Kurangnya akses pemasaran produk IKM di Kabupaten Cirebon</p> <p>6. Lemahnya pengetahuan SDM tentang mutu dan kualitas produk, serta strategi pengembangan produk</p> <p>7. Kurangnya keterampilan manajerial usaha pelaku IKM</p>
<b>EFAS</b>		



Peluang (O)	Strategi (SO)	Strategi (WO)
<p>1. Letak geografis Kabupaten Cirebon yang strategis. Kabupaten Cirebon sebagai simpul pergerakan transportasi antar provinsi yang sering dilintasi jalur perekonomian regional dan nasional. Dijadikannya Kabupaten Cirebon sebagai daerah tujuan destinasi wisata</p> <p>2. Berkembangnya kecanggihan teknologi dan informasi</p> <p>3. Mobilitas penduduk yang luas dan cepat</p>	<p>(1) Meningkatkan sinergi yang baik antara pelaku IKM dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Upaya <i>Branding</i> dengan memperluas wilayah Halal di Kabupaten Cirebon</p> <p>(2) Meningkatkan peran teknologi dalam transaksi keuangan pelaku usaha IKM</p>	<p>(1) Mengadakan pendampingan terhadap pelaku IKM pemula</p> <p>(2) Meningkatkan program fasilitas sertifikasi PIRT dan sertifikasi Halal</p> <p>(3) Meningkatkan kerja sama pemasaran bersama para <i>stakeholder</i></p> <p>(4) Meningkatkan <i>branding</i> produk IKM melalui pemanfaatan media teknologi dan informasi</p> <p>(5) Menyediakan fasilitas pemasaran seperti penyediaan outlet pemasaran</p>



*Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah)*

Peluang (O)	Strategi (SO)	Strategi (WO)
4. Adanya Program Nasional Daerah yang mendukung		(6) Melakukan penetrasi <i>marketplace</i> agar IKM dapat bersaing secara Nasional (7) Memberikan fasilitasi alat produksi (8) Sosialisasi restrukturisasi mesin dan peralatan sebagai bentuk peningkatan mutu kualitas produk IKM
Tantangan (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
1. Lemahnya pengetahuan konsumen terkait pentingnya produk bersertifikasi PIRT dan bersertifikasi halal 2. meningkatkan tingginya persaingan antar pelaku usaha	(1) Memperkuat integrasi antara pelaku IKM dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan produk IKM agar tercipta pembangunan IKM yang <i>sustainable</i>	(1) Meningkatkan kemudahan prosedur dengan tetap mengedepankan kualitas serta standarisasi produk IKM (2) Memberikan kemudahan birokrasi pengurusan izin



Tantangan (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
<p>daerah maupun luar daerah Cirebon</p> <p>3. Regulasi permodalan yang kurang memudahkan</p> <p>4. Biaya pengurusan sertifikasi halal yang relatif mahal</p> <p>5. Adanya persaingan antar produk makanan IKM, UMKM dan usaha dari luar wilayah Cirebon</p> <p>6. Kerja sama pemasaran yang masih terbatas</p>	<p>(2) Peningkatan inovasi produk IKM</p> <p>(3) Mengadakan kegiatan literasi dan edukasi bagi pelaku usaha terkait manajerial usaha seperti halnya pelatihan penggunaan akuntansi dalam dunia usaha</p>	<p>(3) Sosialisasi prosedur perizinan dan legalitas sertifikasi PIRT dan sertifikasi halal</p> <p>(4) Mengadakan pembinaan dan pelatihan pelaku IKM bersama industri yang lebih maju dan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan tepat guna</p> <p>(5) Memberikan fasilitasi permodalan berupa dana bergulir</p>

Sumber: Data Primer, 2019 (diolah)



## **REFERENSI**

- Ahmed, S., dan Sun, H., (2012). Developing a model for managing production performance of small and medium enterprises in Sweden, *Thesis*. Linnaeus University.
- Aca, Kuncoro., dkk . (2007). *Usaha Kecil dan Menengah. Inspiratorial*. Kompas hal G-J. Selasa 17 Juli 2007.
- Amirullah. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Andriani, Dwi Retno. (2012). *Modul Rancangan Usaha Agribisnis*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Anshori, (2005). Usulan Model Keputusan Multikriteria Terintegrasi untuk Pemilihan UKM Penerima Pinjaman Lunak di Wilayah Surabaya. *Thesis*. Surabaya: Teknik Industri-ITS.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- BHMN. (2010). *Pembangunan Perdesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Nogor: IPB Press.
- BPS. (2016). *Jumlah Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil Menurut Provinsi, 2013-2015*. Republik Indonesia.
- BPS. (2020). *Pertumbuhan Produksi Tahunan Industri Mikro dan Kecil Y on Y (2010=100) menurut Provinsi, 2012-2019*. Republik Indonesia.
- Dharmawati, Made. (2017). *Kewirausahaan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Dhewanto, Wawan. Indradewa, Rhian. (2015). *Manajemen Inovasi untuk Usaha Kecil & Mikro*. Bandung: Alfabeta.



- Djajadiningrat, Surna Thahja., Hendriani, Yeni., Famiola, Melia. (2011). *Ekonomi Hijau*. Bandung: REKAYASA SAINS.
- Drucker, Peter F. (1985). *Innovation and Entrepreneurship, Practice and Principles*. NewYork: Harper and Row Publisher.
- Disperindag, Jabar. (2020). *Perkembangan Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah Jawa Barat Tahun 2011-2014*. Jawa Barat.
- Disperdagin. (2019). *Perkembangan Industri di Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2018*. Kabupaten Cirebon.
- Ellitan, Lena., Anatan, Lina. (2009). *Manajemen Inovasi*. Bandung: Alfabeta
- Faridah, Hayyun Durrotul. (2019). Halal Certification in Indonesia: History, Development, And Implementation. *Journal of Halal Product and Research*. Vol. 2. No. 2.
- Fontana, Avanti. (2001). *Inovate We Can!*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Girindra, Aisjah. (2005). LPPOM MUI Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal. Jakarta: LPPOM MUI.
- Graha, Andi Nu. (2011). Peranan UKM Menjalin Kemitraan Guna Memperluas Jaringan, Pengembangan Media dan Sarana berbisnis. *Jurnal Modernisasi*. Vol. 7 No. 1.
- Heltrom, T. (2004). *Innovation as Social Action*. Denmark: Copenhagen Bussiness School.
- Hidayat, Rachmad., Herlambang, Yudha. (2009). Pengembangan Tata Kelola Industri Kecil Menengah Di Madura. *Jurnal Teknik Industri*. Vol. 11 No. 1.
- Hubeis, M. (2005). *Manajemen Kreativitas dan Inovasi dalam Bisnis*. Jakarta: Hecca Mitra Utama.



- Katadata. (2020). *Industri Halal untuk Semua; Ekonomi Syariah tidak terbatas pada industri keuangan saja, sektor riil atau bidang produksi juga tercakup didalamnya.*
- Kasali. (2019). *DISRUPTION : Tak Ada yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kemenperin. (2016). Inovasi Jadi Kunci Sukses IKM Berdaya Saing. Diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/16493/Inovasi-Jadi-Kunci-Sukses-IKM-Berdaya-Saing>.
- Kemenperin. (2020). Konsep dasar dan Prinsip Industri Hijau. Diakses dari <http://industrihijau.kemenperin.go.id/?page=viewartikel&id=9>
- Kholidah, Nur., Hakim, Miftahur Rahman. (2018). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari berbagai Aspek Ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Pekalongan; Pengembangan Sumberdaya Wilayah Pantura dalam Rangka Penguatan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0.*
- Lestari, Ety Puji. (2010). Penguatan Ekonomi Industri Kecil dan Menengah Melalui Platform Klaster Industri. *Jurnal Organisasi dan Manajemen.* Vol. 6 No. 2.
- LPPOM MUI. (2008). *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal.* Jakarta.
- LPPOM MUI. (2020). *Sejarah LPPOM MUI.* Diakses dari: <http://halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>
- Makmun, Makmun. 2016. Green Economy: Konsep, Implementasi Dan Peran Kementerian Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan.* Vol. 19. No. 2.
- Mawardi, (2007). *Ekonomi Islam.* Pekanbaru: Alfa Riau.



- Mejstrik, M., Dvořák, V., Bracháček, D., (2001). Threats and opportunities for smes of joining the single european market: Czech republic country report. *Paper Prepared For The Phare Ace Project P97-8178r: The Adjustment Process of SMEs in Poland and the Czech Republic to the Single European Market*, Institute of Economic Studies of Charles University FSV Prague – Czech.
- Mubyarto. (1997). *Ekonomi Rakyat, program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Muchlas, Zainul. (2015). Strategi Inovasi dan Daya Saing Industri Kecil Menengah (IKM) Agro Industri di Kota Batu. *Jurnal JIBEKA* Vol. 9, No. 2, Agustus.
- Muhlizi, Argan Faiz. (2017). Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional; Badan Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 6, No. 3, Desember.
- Nasir, M., Saputro, Edy Purwo., Handayani, Sih. (2016). Manajemen Pengelolaan Limbah Industri. *Benefit: Jurnal Managemen dan Bisnis*. Vol. 19, No. 2, Desember.
- Nu'man, A. Harits. (2005). Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebagai Upaya Untuk Menghadapi Era Perdagangan Bebas (Suatu Model Konseptual Dalam Pengembangan IKM). *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol. 16 No. 3, Juli-September.
- OJK. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Republik Indonesia.



- Partomo, Tiktik Sartika., Soejoedono, Abd Rachman. (2002). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Bekasi: Ghalia Indonesia.
- Partomo, Tiktik Sartika., Soejoedono, Abd Rachman. (2004). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Bekasi: Ghalia Indonesia.
- Permenperin. (2016). *Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Indonesia*. Menteri Perindustrian Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019. *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 Tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan*. Republik Indonesia.
- Pinti, Elabe. (2013). *Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan Usaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau menurut Ekonomi Islam*. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Al-Jamiah Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Putri, Ekawati Ningtyas., Nuringwahyu, Sri., Hardati, Ratna Nikin. (2019). *Peranan Motivasi dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi pada Bandung Super Model Malang)*. *Jurnal JIAGABI*. Volume 8, No.1.
- Qardhawi, Yusuf. (2007). *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.



- Rahayu, Endang Sri. (2010). Kemitraan Usaha Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing UKM (Studi Di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Jakarta Timur). *Jurnal EconoSains*. Vol. 8. No.2, 2010.
- Ratnasari, Andri. (2013). Peranan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*. Vol. 1, No. 3, Oktober.
- Sandika, Rudi Sofia., Maulida, Yusni., Setiawan, Deny. (2014). Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal JOM FEEKON*. Vol 1, No. 2, Oktober.
- Saparuddin, Muhammad. (2011). Dampak Industri Kecil dan Menengah pada Kesempatan Kerja dan Pendapatan per Kapita. *Jurnal Trikonomika*. Vol. 10, No. 2, Desember.
- Saragih, Rintan. (2017). Membangun Usaha Kreatif, Inovatif dan Bermanfaat Melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Kewirausahaan*. Universitas Methodist Indonesia.
- Sasono, Eko ., Y, Rahmi. (2014). Manajemen Inovasi pada Usaha Kecil Menengah. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 6, No. 3, Oktober.
- Satya, Venti Eka. (2018). Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0. Kajian Sngkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. *INFO Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Vol 10, No. 9, Mei.
- Setyaningsih, Eka Dyah. (2015). Peluang dan Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Moneter*. Vol 2, No.1, April.
- Sulistiani, Dwi. (2014). Analisis SWOT Sebagai Strategi Perusahaan Dalam Memenangkan Persaingan Bisnis. *Jurnal El-Qudwah: Jurnal Integritas Sains dan Islam*. Oktober.



- Sumardjo. (2008). *Penyuluhan Pembangunan, Pilar Pendukung Kebijakan dan Kemandirian Masyarakat*. Dalam Ida Yustina dan Adjat Sudrajat “Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat”. Sydex Plus.
- Sumihardjo, Tumar. (2008). *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Suryana, Yuyus., Bayu, Kartib. (2010). *Kewirausahaan; Pendekatan Karakteristikk Wirausahawan Sukses Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Suzantho, Ferry., Hadi, Wahyono. (2019). *Perumusan Strategi Perbaikan Manajemen UKM Menuju Industri Hijau Studi Kasus Pada Empat UKM Di Surabaya. Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Indonesia*. ISSN 2085-4218
- Tambunan, Tulus T.H. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia : Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Teguh, Monika., Ciawati, Selvy Tri. (2020). *Perancangan Strategi Digital Marketing Communication bagi Industri Perhotelan dalam Menjawab Tantangan Era Posmoderen. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*. Vol. 6, No.1.
- Tim Penelitian dan Pengembangan Perkreditan dan UMKM. (2009). *Pola Pembiayaan Usaha Kecil Usaha Franchiese*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indoneisa



- Wijaya, David. (2018). Akuntansi UMKM. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Wilantara, Rio F., Susilawati. (2016). Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA). Bandung: Refika Aditama.
- Winardi. (2003). *Entrepreneur dan Entrepreneurship*. Jakarta: Prenada Media.
- Yakin, Addinul. (1997). Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan: Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta : Akademika Pressindo
- Yasin, Fachri. (2003). *Agrobisnis Riau Perkebunan Berbasis Kerakyatan*. Pekanbaru: Unri Pers.
- Yuliani Saul, Ellen. (2015). Strategi Bersaing dan Strategi Bertahan Pada Industri Mikro dan Kecil Bakpia Pathok di Kecamatan Ngampilan Yogyakarta Tahun 2015, S1 Thesis, UAJY. (<http://e-journal.uajy.ac.id/8741/3/2EP19056.pdf>)
- Yusdianto. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *PADJADJARAN: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 3.
- Kemenperin. (2018). Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja IKM Ditargetkan Naik Setiap Tahun. Diakses dari <https://www.kemenperin.go.id/artikel/18855/Jumlah-Unit-Usaha-dan-Tenaga-Kerja-IKM-Ditargetkan-Naik-Setiap-Tahun>.



## PROFIL PENULIS



**Syaeful Bakhri, S.E, M.Si** merupakan Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang lahir di Cirebon pada tanggal 25 Nopember 1973. Menyelesaikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Manajemen di Tahun 1998 dan program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi di Universitas Jenderal

Soedirman Purwokerto pada Tahun 2015.

Pengalaman berorganisasi, sebagai Badan Pendiri Universitas Muhammadiyah Cirebon (1999), Pengurus Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Cirebon (2000), dan menjadi Kepala Bidang Hukum dan Perundang-undangan Gabungan Pengusaha Konstruksi (GAPENSI) Kota Cirebon hingga Tahun 2014. Bendahara Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Perwakilan Cirebon dari tahun 2018 hingga sekarang.

Pengalaman Kerja dalam kurun waktu 1998 sampai pada tahun ini, pernah menjadi tenaga Pendamping Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani Tahun 1998, menjadi tenaga Pendamping Program P4M2T Tahun 1999, menjadi Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun 2000-2001, menjadi Project officer PT. Balai Pustaka Peraga untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah Tahun 2005-2006, menjadi Project Officer untuk *Maintenance* SIMPADU Kanwil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007, menjadi Trainer Program Sistem



*Syaeful Bakhri*

Informasi Madrasah (SIMAD) di wilayah Provinsi Sumatera Barat, menjadi Trainer Program Simpadu di kanwil Agama Provinsi Jambi, menjadi Administration Project pada Project DAK pendidikan di Provinsi Lampung, menjadi Konsultan di beberapa Instansi di beberapa Pemerintah daerah Kabupaten/Kota baik di Jawa maupun luar Jawa. Pengalaman mengajar dimulai dari Universitas Muhammadiyah Cirebon tahun 1999-2001, kemudian di Lembaga Pendidikan Profesional Indonesia (LP2i) Cirebon tahun 2001-2002, selanjutnya di LP3i Surabaya, AMIK Pakarti Lahun Cirebon, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon dan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari tahun 2004 hingga sekarang.

Untuk korespondensi dan diskusi, kritik serta saran bisa melalui alamat email : ***syaefulbakhrioke@gmail.com***.

